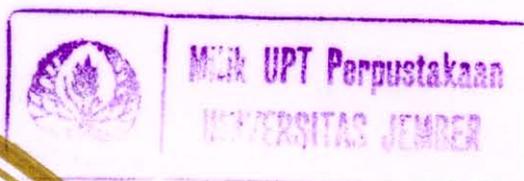


UNIFIKASI YAMAN 22 MEI 1990

(SEBUAH ANALISIS TENTANG FAKTOR PENGHAMBAT DAN
FAKTOR PENDORONG UNIFIKASI YAMAN UTARA
DAN YAMAN SELATAN TAHUN 1972-1990)

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Asal	Hadiah	Kelas
	Pembelian	327.53
Terima Tgl: 24 SEP 2002		7AH
No. Induk :		4

Oleh :

YASIR YAHYA

NIM. 970910101203

Pembimbing :

Drs. Sjoekron Sjah' SU

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2002

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH TIM PENGUJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA LENGKAP
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

DIPERTAHANKAN DI MUKA TIM PENGUJI

PADA HARI : RABU

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2002

JAM : 09.30

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

TIM PENGUJI

KETUA



(Prof. Dr. A. Khusyairi, MA)

SEKRETARIS



(Drs. Sjoekron Sjah, SU)

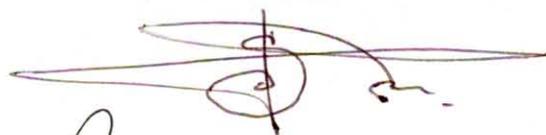
ANGGOTA TIM PENGUJI

ANGGOTA



(Drs. Asrial Aziz)

ANGGOTA



(Drs. Supriadi, MSI)

MENGETAHUI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEKAN,



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130.524.832

MOTTO:

S

1. **Iqra bismi rab-bikal ladzii khalaq.**
Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan.
Al Alaq ayat 1
2. **Falaqtahamal 'aqabah.**
Mengapa dia (manusia) tidak berjihad (berjuang) untuk menempuh jalan yang mendaki (sukar) itu.
Al Balad ayat 11

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Yahya Mohammad Bahasoean

&

Noer Salim Bahanan

Ayah bunda tercinta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbli`alamiin, tiada kata yang terindah selain memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas keridhaan-Nya yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan lahir dan batin pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Unifikasi Yaman 22 Mei 1990 (Sebuah Analisis tentang Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan tahun 1972-1990)” ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna mencapai gelar strata-1 (S1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan gangguan yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga, waktu, dan biaya. Tetapi penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya tulis yang baik meski masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sangat diharapkan saran dari para pembaca untuk perbaikan penulisan di lain kesempatan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan materiil dan moril dari berbagai pihak, berupa dorongan, semangat, bimbingan, petunjuk, pengarahan, serta doa baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga atas bantuannya, penulis sangat berterima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, dan instansi-instansi terkait, terutama kepada:

Allah SWT, berkat karunia, dorongan semangat untuk tetap mengerjakan skripsi ini, dan perlindungan dari godaan duniawi yang seringkali mengganggu proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.

2. Drs. H. Moch. Toerki, selaku dekan FISIP Universitas Jember.
3. Prof. DR. H. A. Khusyairi, MA, selaku dosen wali penulis.
4. Para anggota yang terhormat Tim Penguji Skripsi
5. Para staf bagian pengajaran, akademik, dan kemahasiswaan FISIP Universitas Jember atas segala bantuan dan fasilitasnya.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan FISIP Universitas Jember.
7. Yang terhormat, duta besar Republik Yaman beserta staf atas segala kebaikan, bantuan, dan fasilitasnya yang sangat menunjang kelancaran skripsi ini.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan *Center Strategic of International Studies* (CSIS) Jakarta.
9. Teman-teman dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya yang sangat besar artinya bagi penulis. Terima kasih banyak.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, agama, bangsa, dan negara, serta menjadi sebuah persembahan untuk almamater tercinta. Amien.

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.3. Perumusan Masalah	4
1.4. Kerangka Dasar Teori	5
1.5. Hipotesis	7
1.6. Metode Penelitian dan Pendekatan	8
1.6.1. Metode Pengumpulan Data	9
1.6.2. Metode Analisis Data	9
1.6.3. Metode Pendekatan	10
BAB II KONDISI UMUM YAMAN	11
2.1. Kondisi Geografi	11
2.2. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat	12
2.3. Sistem Keagamaan	13
2.4. Latar Belakang Sejarah	13
2.4.1. Zaman Pra-Islam	14
2.4.2. Yaman pada Awal Masuknya Islam	16
2.4.3. Yaman pada Abad XVI-XIX Masehi	18
2.4.3.1. Kota Kolonial Aden	20
2.4.4. Yaman Modern (Abad XX Masehi)	23
2.4.5. Daerah Protektorat Arab selatan	26
2.4.5.1. Negara Bagian Protektorat Timur ..	27
2.4.5.2. Negara Bagian Protektorat Barat ..	28
2.5. Revolusi Besar di Yaman	28
2.5.1. Revolusi 26 September 1962	28
2.5.2. Revolusi 14 Oktober 1963	29
BAB III PERISTIWA-PERISTIWA YANG MENGHAMBAT TERWUJUDNYA UNIFIKASI YAMAN	30
3.1. Konflik-Konflik antara PDRY dan YAR	31
3.2. Konflik-Konflik Dalam Negeri	35
3.2.1. Yemen Arab Republic (Yaman Utara)	35
3.2.2. People Democratic Republic of Yemen (PDRY)	37
3.3. Hubungan Luar negeri YAR	39

3.3.1. Hubungan Luar negeri YAR dengan Negara Blok Barat dan Saudi Arabia	39
3.3.2. Hubungan Luar negeri YAR dengan Uni Soviet	41
3.4. Hubungan Luar Negeri PDRY	42
3.4.1. Hubungan Luar negeri PDRY dengan Negara Blok Barat dan Saudi Arabia	42
3.4.2. Hubungan Luar negeri PDRY dengan Uni Soviet	43
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERWUJUDNYA UNIFIKASI YAMAN 22 MEI 1990.....	48
4.1. Ide Awal Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan	48
4.2. Hal-hal yang Mempengaruhi Terwujudnya Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan	48
4.2.1. Keinginan Bersama.....	49
4.2.2. Kondisi Ekonomi	50
4.2.2.1. YAR (Yaman Utara).....	51
4.2.2.2. PDRY (Yaman Selatan).....	52
4.2.2.3. Kerjasama dan Dampak Unifikasi pada Bidang Ekonomi.....	54
4.2.3. Penemuan Minyak	55
4.2.3.1. Kerjasama Eksplorasi dan Dampak Unifikasi pada Bidang Perminyakan	55
4.2.4. Runtuhnya Uni Soviet	56
4.3. Langkah-Langkah Menuju Unifikasi.....	57
4.3.1. Perjanjian Kairo 28 Oktober 1972	57
4.3.2. Deklarasi Tripoli 26-28 November 1972.....	60
4.3.3. Perjanjian Kuwait	61
4.3.4. Perjanjian Sana`a 4 Mei 1988.....	63
4.3.5. Perjanjian Perbatasan Sana`a 4 Mei 1988.....	64
4.3.6. Perjanjian Aden 30 November 1989.....	65
4.3.7. Perjanjian Sana`a 22 April 1990.....	68
4.3.8. Perjanjian Sana`a 4 Mei 1990.....	71
4.3.9. Perjanjian Ta`izz 5 Mei 1990.....	72
4.4. Peristiwa Setelah terjadinya Unifikasi.....	73
4.5. Harapan untuk Suatu Kemajuan	75
BAB V KESIMPULAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	80



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Jazirah Arab merupakan suatu daerah yang sangat menarik untuk dikaji dengan khasanah budayanya yang sangat kaya. Selain itu Jazirah Arab atau yang biasa disebut Timur Tengah juga mempunyai potensi konflik yang cukup kompleks mulai dari masalah perbedaan mazhab (yang paling menonjol adalah Sunni dan Syi'ah), penetapan perbatasan yang belum jelas, pertikaian antarsuku, konflik Arab-Israel, terorisme, dan masih banyak yang lain.

Meskipun menyimpan potensi konflik yang cukup besar, budaya Arab adalah budaya yang sangat mengakar dan mampu mempengaruhi budaya yang lain terutama semenjak adanya agama Islam. Budaya Arab tersebar mulai dari Afrika Utara ke Afrika Tengah, sebagian kecil Eropa sampai pegunungan Kaukasus, Persia (sekarang Iran) sampai Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

Yaman adalah merupakan salah satu dari negara-negara Arab yang juga mempunyai ciri-ciri kultur, bahasa, dan agama yang hampir sama yang terletak di ujung paling selatan Semenanjung Arabia. Banyak orang berpendapat bahwa Yaman merupakan daerah asal bangsa Arab jika dilihat dari sejarah pada saat Nabi Ismail menyebarkan ajaran agama pada suku Jurhum yang berasal dari negeri Yaman dan menikah dengan wanita dari suku itu yang kemudian berkembang menjadi bangsa Arab seperti sekarang ini.

Yaman pada awalnya mempunyai peradaban yang cukup maju di jaman Kerajaan Saba' (750 SM – 115 SM), setelah keruntuhan Kerajaan Saba' Yaman kemudian dikuasai oleh Kerajaan Himyarit, Romawi, Ethiopia, dan Persia. Pada abad ke tujuh dikuasai oleh Islam dan di daerah Selatan sempat dikuasai Inggris (1886-1967). Sampai kemudian terbentuk Yaman Selatan dan Yaman Utara.¹ Hubungan antara kedua negara yang bertetangga ini pada mulanya sering

¹ <http://www.arab.net/yemen.html>, *The Country and People of Yemen*, diakses tanggal 1 Nopember 2001.

diwarnai dengan konflik. Sebuah perjanjian pada tahun 1972 yang berusaha untuk menggabungkan kedua negara tidak terwujud. Pada tahun 1979 terjadi perang selama dua minggu yang mengikuti rencana unifikasi yang baru. Pada tahun 1981 draf konstitusi mulai disusun namun terjadi konflik kecil yang menimbulkan perang sipil pada tahun 1986. Akhirnya pada akhir November 1989 tercapailah persetujuan untuk berunifikasi yang terlaksana pada tanggal 22 Mei 1990.²

Yaman Selatan yang berideologi marxisme pada awalnya adalah pihak yang sering memicu konflik, apalagi dengan tindakannya yang memberi dukungan pada pihak oposisi di Yaman Utara yang akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Namun dengan keruntuhan Uni Soviet yang selama ini menjadi patron negara-negara komunis sedikit banyak telah merubah arah politik luar negeri Yaman Selatan menjadi lebih condong kepada negara-negara Arab lainnya, terutama yang menjadi tetangganya.

Dengan standar hidup yang hampir terendah di dunia membuat pemerintahan dua negara Yaman berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Kehidupan yang keras membuat orang-orang Yaman tergantung terhadap sumber daya alam yang mereka miliki.³ Kemudian ditemukan sumber-sumber minyak di kedua negara sekitar tahun 1986, dan sumber-sumber lain di daerah perbatasan.⁴ Penemuan sumber-sumber minyak tersebut menimbulkan harapan baru bagi Yaman untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Tidak seperti negara-negara lain di daerah teluk yang mempunyai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibanding Yaman karena lebih dulu menemukan sumber minyak di daerahnya masing-masing. Di era sebelumnya bantuan ekonomi yang diberikan oleh keluarga yang bekerja di perantauan sangat membantu kehidupan warga Yaman.

² Gerd Noneman, 1994, *Colliers Encyclopedia*, vol. XXIII, P.F. Collier, L.P., New York, hal. 698.

³ *Encyclopedia of Knowledge*, 1991, Grolier Inc., Danbury, Connecticut, hal. 77.

⁴ Gerd Noneman, 1994, loc. Cit.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penganalisisan secara sistematis dan terarah dalam membahas suatu fenomena, maka diperlukan ruang lingkup pembahasan untuk menghindari kerancuan yang ditimbulkan oleh meluasnya masalah. Pembatasan tersebut dimaksudkan pula untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data/informasi.

Adapun pendapat yang diuraikan oleh Sutrisno Hadi adalah:

“ Semua peristiwa berkaitan dengan rangkaian hukum kasualitas, tetapi tidak semua sebab dapat menimbulkan akibat, karena sebab-sebab ini harus dibatasi oleh ruang dan waktu. ”⁵

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis membatasinya dalam dua batasan yang meliputi :

1. Batasan Materi

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan khususnya faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya unifikasi dua negara.

2. Batasan Waktu

Yaitu sejak disusunnya suatu persetujuan untuk berunifikasi yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 1972 di Kairo sampai terlaksananya unifikasi pada tanggal 22 Mei 1990 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan.

Namun dalam penulisan selanjutnya, tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah-masalah lain, sepanjang dipandang relevan dan mendukung pokok permasalahan agar karya ilmiah ini dapat memberi gambaran yang komprehensif dan juga sebagai upaya agar dapat mendekati kesempurnaan penulisan.

⁵ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., 1986, *Metode Research*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 19.

1.3. Perumusan Masalah

Setiap penelitian, dalam menganalisis suatu peristiwa, kita pada suatu titik tertentu akan terbentur pada suatu permasalahan. Permasalahan inilah yang akan menjadi obyek penulis dan yang akan memberi isi dan arah bagi penulis sehingga perlu dirumuskan dengan jelas dan tegas serta sederhana tanpa mengurangi arti penting pokok permasalahan tersebut. Para pakar yang memiliki kapasitas dalam penulisan ilmiah memberikan definisi permasalahan sebagai berikut :

The Liang Gie berpendapat bahwa :

“Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui dengan lebih mendalam. Masalah berhubungan dengan ilmu, ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya.”⁶

Menurut Winardi Surahmat adalah :

“Permasalahan adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.”⁷

Dengan dasar definisi tersebut di atas maka penulis dalam penulisan ilmiah ini akan mengajukan permasalahan, dan permasalahan inilah yang akan diangkat dan dijadikan topik pembahasan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya. Perumusan permasalahan yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

“Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong antara negara Yaman Utara dan negara Yaman Selatan untuk

⁶ The Liang Gie, 1978, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 49.

⁷ Winardi Surahmat, 1970, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, hal. 36.

melakukan unifikasi sehingga menjadi satu negara dengan satu sistem pemerintahan ?.”

1.4. Kerangka Dasar Teori

Dalam mencari solusi terhadap problematika yang telah diajukan di atas, diperlukan suatu teori yang dapat memberikan dukungan atas hipotesis yang diajukan. Teori ini mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai landasan berpijak untuk memecahkan masalah dan menganalisa masalah yang diajukan.

Adapun teori menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraf adalah sebagai berikut :

“Teori adalah suatu cara mengorganisasikan pengetahuan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang pantas dicarikan jawaban-jawaban yang valid.”⁸

Semakin jelaslah bahwa dasar pandangan mengenai kerangka dasar teori memegang peranan penting dalam setiap penulisan ilmiah, karena teori merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang akan kita amati. Selain itu teori berfungsi untuk membimbing gerak langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dari uraian diatas penulis mencoba untuk menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan *Teori Integrasi*. Definisi dari Teori Integrasi seperti yang dikemukakan oleh Ernst Haas, adalah sebagai berikut :

“Ernst Haas defines *integration* as a process whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectation, and political activities toward a new center, whose institutions possess or demand jurisdiction over the preexisting national states.”⁹

⁸ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraf, 1978, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, Terjemahan XI, Amien Rais, UGM, Yogyakarta, hal. 49.

⁹ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraft Jr., 1997, *Contending Theories of International Relation : A Comprehensive Survey*, Longman, New York, hal. 420-1.

Yang artinya Ernst Haas mendefinisikan integrasi sebagai sebuah proses dimana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan aktifitas politik mereka menuju sebuah pusat politik yang baru, yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya.¹⁰ Sedangkan dalam teori integrasi itu sendiri mengandung beberapa aliran, yaitu:

1. Aliran Pemikiran Federalis.

Aliran ini memandang integrasi dalam pengertian legal dan institusional. Bagi ilmuwan federalis, integrasi adalah hasil akhir, bukan suatu proses. Mereka bertujuan menciptakan penyatuan politik diantara wilayah-wilayah yang semula bebas dan berdaulat.

2. Aliran Pemikiran Pendekatan Komunikasi.

Pendekatan ini mencoba mengukur proses integrasi dengan memperhatikan arus transaksi internasional, seperti perdagangan, pariwisata, surat menyurat, dan imigrasi. Diduga bahwa transaksi seperti itu pada akhirnya akan mendorong perkembangan suatu sistem sosio-politik yang bersatu, yang disebut Sistem Komunitas Keamanan.

3. Aliran Pemikiran Neo-Fungsionalisme.

Memandang integrasi sebagai suatu proses maupun sebagai suatu hasil, tetapi untuk menilai kemajuan ke arah integrasi mereka lebih memusatkan perhatian pada proses pembuatan keputusan kooperatif dan pada sikap elit. Aliran ini yang dipelopori oleh Ernst Haas, terutama sekali memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga formal dalam upaya menentukan apakah fungsi-fungsi penting lebih banyak dijalankan oleh badan nasional atau oleh badan internasional, kemudian mereka mencoba menilai seberapa jauh elit di berbagai negara menampilkan sikap nasionalis atau internasionalis.¹¹

Dengan melihat fenomena yang ada di Yaman di tahun 1990, unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan sampai sekarang merupakan suatu hal

¹⁰ Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, hal. 153.

¹¹ Mohtar Masyarakat' oed, 1989, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis daerah Teorisis*, UGM, Studi Sosial, Yogyakarta, hal. 173-4.

yang langka untuk daerah Timur Tengah. Sebelumnya pernah terjadi antara Mesir dan Siria juga terbentuk atas keinginan bersama tanpa paksaan. Namun tidak bertahan lama karena adanya kepentingan ekonomi, maka Mesir berinisiatif untuk menjadi negara terpisah seperti sebelumnya. Selain dua unifikasi tersebut yang lebih sering terjadi di wilayah Timur Tengah adalah konflik. Ada sebuah idiom yang didengar penulis ketika berkonsultasi dengan Bapak Prof. DR. Khusyairi¹² yang mengatakan bahwa bangsa Arab mempunyai tiga kesepakatan bersama. Pertama mereka sepakat bahwasanya Israel adalah musuh bersama, yang kedua sepakat untuk memakai bahasa dan budaya yang sama, dan yang ketiga sepakat untuk tidak bersepakat.

Dengan memperhatikan idiom di atas maka terjadinya unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan yang terjadi pada tahun 1990 dan bertahan sampai sekarang merupakan suatu hal yang langka di Jazirah Arab. Sebelum unifikasi terlaksana, hubungan di antara ke dua negara ini lebih sering dipenuhi dengan konflik, apalagi di antara kedua negara tersebut terdapat perbedaan ideologi. Yaman Selatan berideologi marxis sehingga bentuk pemerintahannya condong ke arah komunis,¹³ sedangkan Yaman Utara mempunyai sistem pemerintahan berbentuk diktator militer dengan penerapan syari'ah Islam dan Ali Abdullah Saleh sebagai presidennya. Namun semenjak ditemukannya ladang minyak dan adanya perubahan arah politik dalam hubungan internasional karena keruntuhan Uni Soviet membuat Yaman Selatan yang pada awalnya sering memulai konflik merubah arah politik luar negerinya untuk lebih memperlambat hubungan dengan negara – negara Arab yang sebenarnya adalah satu bangsa, sehingga pembicaraan menuju ke arah unifikasi terbuka lebih lebar.

1.5. Hipotesis

Suatu penulisan yang memiliki bobot ilmiah, tentu akan diikuti dengan adanya sebuah hipotesis. Kedudukan hipotesis dalam pembahasan suatu

¹² Guru besar FISIP jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jember.

¹³ Gerd Noneman, 1994, op. Cit., hal. 696.

permasalahan sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Sutrisno Hadi, M.A adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar, mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu. Dan diterima jika ada faktor-faktor yang membenarkannya. Penolakan atau penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.”¹⁴

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka dasar teori, maka dapatlah disusun hipotesis sebagai berikut :

“Terjadinya unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan karena adanya keinginan dari kedua negara untuk menjadi satu negara dan untuk meningkatkan tingkat perekonomian bersama, yang dilatarbelakangi oleh runtuhnya Uni Soviet yang mempengaruhi arah politik luar negeri Yaman Selatan kepada negara – negara Arab.”

1.6. Metode Penelitian dan Pendekatan

Suatu penelitian selalu mempunyai tujuan pokok, yaitu ingin menerangkan suatu fenomena, dimana untuk dapat memahami suatu fenomena, peneliti harus menghubungkan fenomena satu dengan yang lain. Maka hal ini secara otomatis akan memerlukan data untuk selanjutnya dapat dianalisis, sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi:

“Usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.”¹⁵

¹⁴ Sutrisno Hadi, 1978, *Methodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal.63.

¹⁵ Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 63.

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode antara lain :

1. Metode pengumpulan data.
2. Metode analisa data.
3. Metode pendekatan.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Berhubungan dengan penelitian yang digunakan penulis, maka bentuk penelitian ini melalui metode observasi, yaitu dengan studi literatur / studi kepustakaan (library research). Sumber-sumber data tidak hanya berasal dari buku-buku literatur, tetapi dari artikel, surat kabar, serta data penunjang lainnya yang berhubungan dengan masalah penulisan ini seperti menggunakan fasilitas internet.

Adapun pengumpulan data dan penelitian akan dilakukan penulis di perpustakaan atau lembaga terkait, sebagai berikut :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan CSIS Jakarta.
4. melalui fasilitas internet.

1.6.2. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan validitas penulisan ilmiah, maka harus dilakukan lebih dulu analisis yang cermat terhadap data-data yang sudah diperoleh. Kemudian untuk sampai pada suatu kesimpulan, maka analisis tersebut harus mengikuti metode berpikir yang sudah lazim dipakai secara umum.

Dengan menggunakan prinsip berpikir deduktif yaitu metode penyelidikan yang didasarkan atas azas yang umum dipergunakan untuk menerangkan peristiwa khusus atau penjelasan teoritis yang umumnya faktanya konkret¹⁶, penulis berusaha untuk menganalisis data-data secara berkolerasi sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu jawaban sebagai pemecahan atas permasalahan yang ada dan yang paling mendekati kebenaran ilmiah.

¹⁶ F. Iswara, 1976, *Pengetahuan Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, hal.65.

Terjadinya unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman selatan yang merupakan suatu fenomena yang langka di timur tengah, disini kita melihat banyak faktor yang mempengaruhi unifikasi tersebut mulai dari keinginan bersama, keinginan untuk meningkatkan perekonomian bersama yang diiringi dengan keruntuhan USSR yang menjadi patron bagi Yaman Selatan.

1.6.3. Metode Pendekatan

Agar suatu peristiwa mempunyai kebenaran ilmiah yang tinggi, maka perlu suatu pendekatan ilmiah. Karena suatu pendekatan ilmiah menggunakan kriteria tertentu untuk menyelidiki suatu ilmu tertentu.

Pendekatan menurut Liang Gie adalah keseluruhan sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran, pangkal duga, dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sesuatu yang telah ditelaah oleh ilmu itu.¹⁷

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan politik karena keduanya sangat erat hubungannya. Penelaahan terhadap fenomena politik akan lebih berhasil jika dihubungkan dengan pengetahuan sejarah di dalamnya, karena sejarah menyumbang banyak bahan data dan fakta masa lampau yang amat penting bagi perkembangan ilmu politik.

¹⁷ The Liang Gie, 1984, *Ilmu Politik, Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup, dan Metodologi*, FISIP-UGM, Yogyakarta, hal. 103.



BAB II KONDISI UMUM YAMAN

2.1. Kondisi Geografis

Republik Yaman terletak di bagian ujung barat daya semenanjung Arab, antara 12⁰-20⁰ LU, dan 14⁰-54⁰ BB. Total area yang dimiliki adalah ± 555.000 km². Republik Yaman beribu kota di Sana'a yang terletak di dataran tinggi Al Jehal (± 2175 m dpl). Republik Yaman berbatasan dengan Saudi Arabia di sebelah utara, laut Arab dan samudra Hindia di sebelah selatan, laut Merah di sebelah barat, dan kesultanan Oman di sebelah timur.¹⁸ Meskipun berbatasan dengan Kesultanan Oman dan Saudi Arabia, tetapi batas-batas itu tidaklah jelas. Penampakan di peta pun masih memperlihatkan variasi tentang garis batas ini, atau bahkan kadang-kadang tidak mengindikasikan hal ini sama sekali.

Kondisi topografi Republik Yaman sangat beragam, mulai dari daerah yang bergunung-gunung, bukit-bukit, sampai daerah berpantai. Namun dataran tinggi dan perbukitan sangat mendominasi topografi negara ini. Yaman juga kaya akan pulau dan kepulauan, yang mayoritas tersebar di sepanjang laut Merah dan sebagian lagi di laut Arab. Pulau yang terbesar adalah Kamaran dan pulau Socotra di laut Arab. Pulau-pulau yang ada di Yaman masing-masing mempunyai kondisi cuaca, lingkungan, flora dan fauna yang langka, dan vegetasi yang beragam.¹⁹

Keistimewaan atau ciri-ciri yang paling menonjol adalah adanya Wadi (lembah) Hadramaut. Sebuah lembah yang sangat besar, luas, dan sangat mempesona yang terhampar hingga daerah pantai yang berjarak ± 160-240 km dari daerah pedalaman (hinterland). Bagian di negara ini yang paling banyak penghuninya adalah di daerah dataran rendah, sedangkan daerah dataran tinggi dengan kondisi air yang tidak selalu mengalir, dan kondisi tanahnya yang berupa endapan hanya dihuni oleh sekelompok petani. Lahan yang paling produktif di Yaman adalah di Lahj, kota yang berada di dekat kota Aden, dua distrik dekat

¹⁸ *Republic of Yemen; 10 Years of Achievements 1990-2000*, Ministry of Planning and Development, 2000, Arab Paper Converting and Trading Co. LTD., Sana'a, hal. 18.

¹⁹ *Ibid*, hal. 26.

daerah Mukalla (± 480 km sebelah timur Aden), dan daerah di bagian tengah Hadramaut.²⁰

2.2. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial kemasyarakatan Republik Yaman, sejak dahulu kala berstruktur kesukuan yang mendasari sistem politik Yaman meskipun hal ini sulit untuk ditentukan periode mana yang paling spesifik menentukan tentang kapan penduduk modern mulai eksis di daerah ini. Populasi penduduk daerah pantai telah lebih dahulu bercampur dengan penduduk dari daerah lain atau bahkan dari negara lain.

Kehidupan perekonomian Yaman kuno telah lama terbentuk dalam bidang perdagangan dan pertanian. Para pedagang telah melakukan transaksi dengan pedagang dari daerah lain. Perdagangan ini secara historis menjadi tulang punggung perekonomian saat itu. Bidang pertanian juga menjadi sumber utama kehidupan bangsa Yaman. Konstruksi waduk dan sistem irigasi digunakan secara maksimal. Adanya pemanfaatan lereng-lereng gunung untuk dijadikan teras-teras persawahan menunjukkan adanya kemajuan sistem pertanian saat itu.

Keragaman suku dan adanya aktivitas ekonomi mengakibatkan keragaman bahasa yang ada. Refleksi berpakaianpun sangat berbeda dan disesuaikan dengan kondisi iklim masing-masing daerah. Populasi yang mendiami daerah pantai memakai pakaian yang cenderung berwarna putih/terang, dengan topi anyaman berpori yang berfungsi untuk keluar-masuknya udara sekaligus sebagai pelindung kepala dari sengatan matahari. Di daerah pegunungan, pakaian yang dipakai lebih beragam warnanya. Sedangkan di daerah gunung-gunung dan di daerah utara, umumnya berwarna gelap.

Meskipun ada ikatan yang kuat dan mendalam dalam masing-masing tradisi mereka, tetapi beberapa sifat/ciri yang dianut mulai hilang/musnah dan bercampur dengan tradisi suku yang lain. Ditambah lagi dengan adanya

²⁰ *REF Year Book Mid. The Middle East and North Africa 1992, 38th ed.*, 1991, Europe Publication, England, hal. 987.

pembuatan jalan-jalan yang menghubungkan daerah yang satu ke daerah yang lain, serta adanya sistem transportasi yang semakin modern.²¹

2.3. Sistem Keagamaan

Kehidupan keagamaan Yaman kuno bercirikan adanya penyembahan terhadap berhala dan percaya adanya dewa-dewa sebelum agama Yahudi dan Kristen masuk ke wilayah itu. Berada di bawah kerajaan Saba' dan Makarib, suku-suku di Yaman menjadi kelompok-kelompok yang dipercaya telindung oleh dewa-dewa. Tradisi ini sangat menyatu dengan masyarakat. Salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh penganutnya adalah menyediakan sesaji dan korban-korban persembahan untuk dewa-dewa dan sesembahan mereka.

Konflik-konflik politik dan agama yang terjadi kemudian di sekitar masyarakat Yaman menjadi lebih parah dengan adanya campur tangan pihak Romawi dan Persia dan akhirnya membuat Yaman menjadi tidak stabil. Hal ini terus terjadi sampai agama Islam masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Yaman yang kelak di kemudian hari dapat dipersatukan di bawah bendera Islam.

Respon Yaman atas masuknya Islam sangat baik. Suku-suku di Yaman berlomba-lomba untuk mengirim perwakilannya ke penguasa Islam agar bisa menjadi bagian di dalamnya. Nabi Muhammad menunjuk Farwa bin Messayk sebagai sultan di Mathaj dan Bathan al-Faris (yang berbangsa Persia) sebagai sultan untuk semua daerah Yaman. Rasul sangat menginginkan Yaman bersatu di bawah bendera Islam. Rasul kemudian membagi Yaman menjadi dua daerah: daerah atas, yang terdiri dari Najran, Sa'ada, Al Janad, sampai dengan Aden. Sedangkan daerah bawah terdiri dari Tihama dari daerah Jayzan di utara sampai dengan Aden di selatan.²²

2.4. Latar Belakang Sejarah

Latar belakang sejarah yang akan dibahas di sini dimulai pada zaman sebelum masuknya Islam di Yaman, kemudian permulaan masuknya agama Islam.

²¹ *Republic of Yemen*, 2000, op. Cit., hal. 31.

²² *Ibid*, hal. 56-57.

Dilanjutkan dengan memasuki periode Yaman modern pada abad 20 yang mencakup daerah kolonial Aden, sampai dengan terbentuknya Yaman menjadi daerah utara yang kemudian menjadi Yemen Arab Republic dan daerah selatan yang selanjutnya menjadi People Democratic Republic of Yemen.

2.4.1. Yaman Pra-Islam

Pada milenium sebelum masuknya agama kristen, ada tiga pusat peradaban di semenanjung Arab; pertama di arah barat laut sekitar Madain Shaleh; kedua, di Bahrain (sekarang Uni Emirat Arab); dan yang ketiga, adalah peradaban yang paling maju yaitu Yaman.

Yaman memegang peran yang penting sepanjang sejarah dengan memegang kendali rute perdagangan dunia kuno. Hal ini menandakan bahwa Yaman dulunya adalah sebuah pusat peradaban manusia pada masa itu. Peradaban ini mendorong bangsa Romawi menyebutnya "Arabia Felix" atau "Happy Arabia".

Kerajaan yang menonjol pada masa itu adalah Saba` (± 950 SM-115 SM). Untuk selanjutnya, peradaban yang ikut berkembang adalah Minea, Qatab, Hadramaut, dan Osan. Himyarit adalah suku terakhir yang akhirnya bergabung dengan Saba` dan membentuk negara tunggal.

Kepopuleran Saba` telah tersebar ke seluruh dunia dan telah disebutkan dalam berbagai kitab suci. Perjanjian Lama menyebutkan kisah tentang Ratu Saba` yang berkunjung ke kerajaan Raja Sulaiman dengan membawa sebuah karavan besar dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah dan sejumlah besar emas dan batu-batu berharga. Kesemuanya itu merefleksikan kemakmuran kerajaan Saba`. Pada kitab suci Al-Qur`an juga menyebutkan tentang hal ini dalam surat An-Nahl ayat 22-23.

Prasasti Saba` juga membuktikan pesatnya kemajuan peradaban Saba` yang beribukota di Mareb. Peradaban ini sedikit unik dibandingkan dengan peradaban yang lainnya karena tidak tergantung pada keberadaan sungai-sungai yang besar, tetapi mengandalkan air hujan untuk mengairi ladang-ladang di lereng-lereng gunung, mengontrol air dengan sistem bendungan yang akhirnya

dikenal sampai ke seluruh dunia. Sehingga pada masa itu, masyarakat Saba` diceritakan telah mampu membangun sebuah waduk yang besar di Mareb untuk mengatur irigasi Wadi Adhana. Di Timna, ibukota Qataba, penemuan-penemuan yang ada menunjukkan adanya suatu jaringan kerja yang kompleks mulai dari sistem waduk, kanal, dan tangki-tangki air. Hal ini benar-benar mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni bangunan pada masa itu. Prasasti Siwah mengindikasikan bahwa Mukarib Saba` (Karib Watar: Raja Saba`) telah mampu membentuk suatu pusat negara yang mencakup hampir semua bagian Yaman pada abad 4 SM.

Disamping kemajuan pertanian dan perdagangan dupa, digunakannya pelabuhan di daerah tersebut merupakan mata rantai rute transportasi antara Cina, India, Afrika, dan negara-negara di mediterania. Hal ini membuat Yaman merupakan satu dari daerah terkaya pada masa itu. Menjelang abad 1 SM, Kerajaan Ma`in bergabung dengan Saba` dan diikuti oleh Kerajaan Qataban (tahun 400-500 SM). Kerajaan yang terakhir bergabung adalah Hadramaut dari tahun 450 SM-2 M.

Pada abad ke-3 SM, Himyarit menyatu dengan negara-negara di semenanjung Arab Selatan di bawah kerajaan Saba`. Menjelang akhir abad 2 M, raja-raja Saba` dan Raydan membentuk ibu kota baru di Dhofar bersamaan dengan munculnya dinasti Himyarit yang namanya langsung populer sampai ke Yunani selain ketenaran nama Saba` yang sampai ke Romawi. Himyarit kemudian bergerak ke arah utara dan timur. Semua daerah termasuk yang sekarang menjadi bagian dari Saudi Arabia dan Oman, dulunya adalah daerah di bawah dominasi kerajaan Himyarit yang berkuasa sampai menjelang munculnya Islam (\pm abad 6 M). Hal ini telah dijelaskan dalam prasasti Abdan yang mengisahkan tentang kampanye militer Saba` dan Himyarit di pertengahan abad 4 SM. Mereka mencapai daerah Al Yamama, Bahrain, bagian timur semenanjung Arab, daerah Uzd di Oman, dan suku-suku Ma`Ad, Nezar, dan Ghassan.

Abu Karib bin As`Ad bin Al Malik Kirb Yuhamn, yang juga dikenal sebagai "As`ad Al Kamel" mengambil alih kekuasaan pada awal abad 5 SM, dan memperluas pengaruhnya pada dinasti Himyarit. Beliau kemudian menjadi Raja

Saba`, Dhu Raydan, Hadramaut, Yaman, Toda, dan Tihama. Setelah itu Yaman dikuasai Persia.

2.4.2. Yaman pada Awal Masuknya Islam

Tahun 525, Yaman mengalami periode konflik yang terus menerus yang berakhir lima puluh tahun kemudian (tahun 575). Sekitar satu abad kemudian (abad 7 M) banyak masyarakat di wilayah ini yang memeluk Islam. Kondisi politik saat di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah tidak menjadi lebih baik dibandingkan dengan penguasa dinasti Umayyah sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya sistem kekuasaan yang tidak adil dan sangat otoriter. Penunjukan wali-wali dilakukan di tiap-tiap daerah di Yaman dan hanya berlaku untuk sementara. Antara tahun 712-783, ada 34 orang dinasti Abbasiyah yang memerintah Yaman. Hal ini berakibat negatif pada keadaan negara pada umumnya. Tidak ada kemajuan yang nyata terhadap Yaman yang dibuat pada waktu itu, kecuali usaha-usaha yang terbatas dari seorang wali (sebuah jabatan sejenis gubernur pada sistem kesukuan di Yaman) yaitu Muhammad bin Khaled bin Barmak yang memerintahkan pembangunan "al Barmaki Spring" (sumber air hitam) di tahun 764. Mata air itu menyediakan kebutuhan air di daerah Sana`a meski untuk sementara waktu. Beberapa orang dinasti Abasiyah melakukan usaha-usaha untuk melengkapi pembangunan masjid besar di Sana`a dan sekaligus melakukan rehabilitasi atas masjid-masjid di berbagai daerah, sekolah-sekolah, dan sumber-sumber air yang lain.

Buruknya tingkah laku para wali dan praktek-praktek ketidakadilan sangat mendominasi kekuasaan di daerah Yaman pada tahun 789 M. Kemudian ditunjuklah Ishaq Ibnu Al Abbas yang sebelumnya menjadi wali tetap di Sana`a untuk menjadi wali untuk daerah Yaman. Dia dikenal sebagai penguasa yang suka menindas dan sering mendahulukan kepentingan kelompok/sukunya sendiri, yaitu suku Guraish. Kemudian, para pemimpin Yaman tradisional mulai menampakkan diri. Sultan-sultan dan para kepala suku mendominasi situasi politik saat itu. Para emir di negara-negara kecil dipecah, dan akhirnya mempengaruhi kontrol penguasa Abasiyah yang mulai melemah terhadap Yaman. Peristiwa yang

kemudian yang terjadi adalah terbentuknya banyak emirat baru misalnya Al Ziyad dengan Zabid sebagai ibukotanya dengan daerah kekuasaan dari Tihama sampai daerah-daerah lain di sekitar pegunungan. Wilayah Al Ziyad kemudian dipecah lagi menjadi beberapa emirat yang lebih kecil.

Yaman kemudian dikuasai bangsa Persia. Persia berhasil mengalahkan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Saif bin Dhi Yazan yang membawahi sekitar 8000 pasukan. Kemenangan ini juga didukung oleh suku-suku di Yaman khususnya suku Hamdan. Tahun 882 pemerintah lokal Baghdad yakni Ibnu Ziyad menaklukkan revolusi yang terjadi dan berhasil menyatukan negara-negara yang jumlahnya lebih besar daripada negara-negara yang dulunya pernah dikuasai oleh kerajaan Himyarit. Meski hal ini tidak berlangsung lama, tetapi mampu memisahkan Yaman dari keseluruhan kerajaan Arab.

Saat itu, sistem keagamaan suku-suku di Yaman terbagi menjadi dua, yaitu aliran Muslim Suni yang dianut suku Shafa` mendirikan kekuatan di Tihama (daerah pantai) sementara suku-suku Zaidis yang menganut aliran Syi`ah moderat menguasai daerah dataran tinggi.

Pada abad 9 M, Imam Zaidi, Yahya Al Hadi Ila`l Haq mendirikan dinasti Rassyid yang dapat selamat dari berbagai gangguan akan percobaan-percobaan pembunuhan yang terjadi pada periode Yaman modern.

Paruh ke-2 abad 9 M adalah periode perselisihan religius. Pada saat itu dinasti Ismailliyah mencoba untuk merebut kekuasaan atas Yaman, tetapi pada tahun 897, dinasti Hamdan menghentikan percobaan itu dan mengadakan pengadilan independen atas peristiwa tersebut. Imam-Imam dari suku Zaidi tidak menginginkan adanya perluasan wilayah kekuasaan sampai ke arah barat daya Arab. Mereka hanya ingin secara total menjalankan agama Islam saja dan hanya menginginkan kesetiaan yang absolut untuk menjaga kesejahteraan spiritual mereka.

Pada tahun 1019, berdirilah kerajaan Sulaiyah yang mengambil alih semua wilayah Yaman. Menyusul pembunuhan sultannya: Ali Al Sulayhi pada tahun 1039, kesetiaan pada agama dan politik dari para emir saat itu mulai terpecah. Sebelum terpecah, kerajaan ini sempat mengalami persatuan di bidang

politik yang terjadi selama tiga periode, yaitu: pertama, periode penguasa Raja Al Kamel Ali bin Mohammad Al Sulayhi (1019-1039). Meskipun kekuasaannya tidak lebih dari 20 tahun, dengan ketekunan politiknya, ia mampu menyatukan Oman, Yaman, dan Al Hijaz, memperbaiki sistem legislasi menurut ajaran Islam yang terlepas dari ambisi politik, dan sempat mempunyai hubungan yang baik dengan dinasti Fatimiyah di Mesir.

Hampir bersamaan dengan peristiwa tersebut, pada tahun 1037 ketika suku Ismailiyah berkuasa di Kairo, penguasa wilayah setempat berhasil menaklukkan banyak daerah kekuasaan dinasti Himyarit dan memerintah di Sana'a. Tahun 1174, Sultan Saladin (Salah Ad din Al Ayyubi) menggulingkan dinasti Ismailiyah di Mesir dan mengirim saudaranya untuk menghancurkan pengikut Ismailiyah di Yaman. Untuk sekali lagi, bagian barat daya Arab diperintah oleh penguasa tunggal.

Periode kedua adalah periode penguasa Rasuliyah (1208-1438). Yaman relatif maju pada periode ini, dengan Zabid sebagai ibukota budaya dan Taiz sebagai ibukota politiknya. Pada periode ini ada penyebaran budaya, ilmu pengetahuan, horoskop, pertanian, ilmu pengetahuan Arab, Sufi, literatur-literatur, dan seni. Pengaruh politik disebar ke semua daerah pesisir dari Oman sampai dengan Hijaz, menguasai wilayah-wilayah pegunungan, dengan Imam-Imam yang sangat patuh pada peraturan yang ada dan menerima banyak bantuan dan hadiah dari para penguasa.

Periode berikutnya, adalah periode penguasa Qassim Mutawakil yang menguasai semua wilayah Yaman selama hampir 100 tahun (1625-1725). Keadaan negara saat itu sangat lemah. Aden, Lahj, dan Abyan akhirnya melepaskan diri dari Qasimiyah tahun 1725 M.²³

2.4.3. Yaman pada Abad 16-19 M

Ketika bangsa Portugis mendarat di Tanjung Harapan Afrika, Aden saat itu adalah sebuah pelabuhan komersial yang penting karena merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal dari India ke laut Merah dan sebaliknya. Pelabuhan Aden

²³ Ibid., hal. 59-60.

juga aktif melakukan perdagangan lokal di teluk Persia dan pantai Arab Timur. Tahun 1513, Portugis gagal menaklukkan wilayah ini. Pada tahun 1517, wilayah Yaman dikuasai oleh Kesultanan Ottoman Turki dan menduduki Aden tahun 1538. Hal ini disebabkan adanya ketakutan bahwa kehadiran bangsa Portugis di wilayah Arab Selatan bertujuan untuk mencari basis agar dapat menduduki wilayah tanah suci. Kemudian seorang Pasha ditempatkan di Sana`a dan memerintah hampir semua wilayah Yaman kecuali daerah pegunungan yang dikuasai oleh suku Zaid.

Pada waktu itu dinasti Zaidi di pegunungan utara mulai meninggalkan daerahnya dan di bawah Imam Zaidi yang baru, melancarkan perang gerilya melawan Turki (1566-1570) dan dapat menguasai daerah-daerah sampai wilayah di Arab Selatan termasuk Hadramaut. Pada tahun 1636, perang ini terus dilanjutkan oleh penerusnya dengan melancarkan suatu perang keagamaan yang bersifat nasional dan berakhir dengan diusirnya Turki dari Yaman. Usaha ini akhirnya dapat mempersatukan daerah Arab Selatan termasuk Dhofar dan Assyr di bawah kekuasaan mereka. Beberapa tahun kemudian, Turki kembali dan dapat menguasai Sana`a yang sekaligus dijadikan ibukota. Suku Zaidi akhirnya harus menyerahkan daerah kekuasaannya di sebelah utara di bawah pengawasan pemerintahan Sana`a.

Sekitar abad 17, daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman semakin berkurang. Kewenangannya atas sultan-sultan menjadi sangat kecil. Kewenangan itu akhirnya dipegang oleh seorang kepala suku, yaitu seorang tokoh terkemuka yang kemudian menjadi sultan Lahj. Tahun 1728, gubernur Lahj dan Aden memproklamasikan diri sebagai seorang sultan yang independen yang diikuti oleh Assyr dan daerah lain di selatan.

Tahun 1804, kelompok Wahabi menduduki Mekah dan Madinah, kemudian memasuki Tihamah. Beberapa tahun kemudian, Sultan Ottoman meminta Ali Pasha untuk mengusir mereka. Hal ini dilakukannya untuk mengambil alih Tihamah dan memonopoli perdagangan kopi. Tahun 1837, Sultan Ottoman berhasil menguasai daerah Taiz.

Tahun 1841, Ali Pasha mengevakuasi pasukannya dari Yaman. Saat itu Imam-Imam di Yaman meminta sebuah perjanjian keamanan dari Inggris. Tetapi Inggris menolak permintaan itu. Akhirnya Turki kembali menekan dan pada tahun 1849 berhasil menduduki Hodeida.²⁴ Menyusul pembukaan kembali terusan Suez, memungkinkan Turki untuk kembali mengirim sebuah pasukan besar melalui laut untuk memperkuat posisinya di Arab. Sana`a diduduki kembali tahun 1871.

Pada awal tahun 1870-an, pemerintahan Turki di Sana`a menjalin hubungan dengan beberapa suku termasuk di Hadramaut. Kemudian Turki melantik seorang gubernur untuk memimpin Sana`a tahun 1872. Turki kemudian menduduki daerah Kesultanan Lahj, tetapi menarik pasukannya pada bulan Desember 1873. Inggris kemudian mengkonsolidasikan posisinya dengan perjanjian-perjanjian beruntun yang serupa dengan perjanjian eksklusif dengan para syeh di daerah Teluk. Perjanjian ini adalah sebagai pengganti penjagaan keamanan mereka melawan penyerangan asing. Peristiwa ini merupakan sejarah yang penting di Yaman karena untuk pertama kalinya daerah Arab Selatan terpisah secara resmi ke dalam dua wilayah yang dibatasi secara jelas oleh garis pembatas dan diakui oleh perjanjian internasional.²⁵

2.4.3.1. Kota Kolonial Aden

Tahun 1799, Inggris menduduki pulau Perim. Karena kekurangan air, akhirnya pemerintah Inggris terpaksa menarik pasukannya kembali ke daerah daratan di seberang (Yaman) dengan melakukan kerja sama/perundingan dengan Sultan Lahj.

Pihak Inggris sangat menginginkan untuk mempunyai basis di daerah perairan. Kemudian negosiasi-negosiasi dilakukan untuk memperoleh pulau Socotra. Pulau ini tahun 1834 untuk sementara dibawah kekuasaan sebuah perusahaan di India Timur yang akhirnya menolak mengalihkan kepemilikan pulau kepada pihak Inggris. Hal ini mengakibatkan memburuknya hubungan Inggris dengan sultan tahun 1837. Kejadian ini bersamaan dengan peristiwa

²⁴ *REF Year Book Mid*, 1991, op. Cit., hal. 988.

²⁵ *Ibid.*, hal. 989.

dirampasnya barang-barang dari sebuah pesawat India berbendera Inggris yang mengakibatkan kemarahan pemerintah Inggris di Bombay. Pemerintah Inggris ini akhirnya mengirim pasukannya untuk menyerang Aden. Dengan adanya sebuah perjanjian damai, akhirnya sultan Lahj diharuskan membayar denda sejumlah \$6000 sebagai ganti atas barang-barang yang telah dirampas dan menjadikan Aden sebagai bagian dari kerajaan Inggris di bawah pemerintahan Inggris di Bombay.

Dengan dibukanya kembali terusan Suez di Mesir dan adanya pembaharuan rute di laut Merah, sejak tahun 1853, Aden menjadi pelabuhan bebas yang sangat penting. Pada saat penaklukan, Aden merupakan negara yang tidak dalam kondisi yang menyenangkan. Berpenduduk sekitar 6000 orang termasuk 250 orang keturunan Yahudi, dan 50 orang yang lainnya adalah bangsa India. Selama tujuh tahun kemudian, populasi penduduknya meningkat sampai 25.000 orang. Setelah menolak permintaan Sultan Lahj untuk kembali memiliki kota itu, Inggris kemudian membentuk jalinan persahabatan dengan suku-suku setempat dan memberi mereka bantuan-bantuan melalui pemimpin mereka tetapi tidak mencampuri urusan internal mereka.

Tahun 1869, Aden menuai laba yang besar dengan adanya tambahan yang substansial dalam bidang pelayaran karena dibukanya kembali Terusan Suez di Mesir. Aden pernah menjadi basis militer untuk mengamankan pendapatan dari pulau Perim yang selama ini diincar oleh Perancis sekaligus mengamankan daerah pendudukan di daerah pantai Somalia untuk menjamin tidak adanya musuh yang dapat masuk dari laut Merah.

Pada abad 20, Aden merupakan penghubung ke daerah teluk Persia dan merupakan stasiun pengisian bahan bakar yang ternama. Nilai strategis yang dipunyai Aden juga didasarkan atas suplai air minum yang banyak yang berasal dari sumur-sumur artesis di daerah Shaikh Othman.

Setelah perang dunia I berakhir, ada sebuah diskusi tentang masa depan Aden dan Hinterland, termasuk usulan untuk mempersatukan mereka dengan daerah Somalia yang dikuasai Inggris. Pada tahun 1920-an, Aden dikelola oleh India. Tetapi segala urusan di bidang militer dan politik ditangani oleh pemerintah

Inggris sementara pemerintah kolonial bertanggung jawab atas hinterland. Tahun 1932, pengelolaan Aden diserahkan kepada Gubernur Jendral India. Tahun 1937, pemerintah kolonial mengambil alih Aden. Pada bulan April, Aden memiliki seorang gubernur yang ditunjuk secara terpisah. Status koloni kemudian diperoleh. Dewan Legislatif dibentuk tahun 1944 dan mulai melaksanakan tugasnya tahun 1947, dan tahun 1949 pemilu I digelar.

Tahun 1955 sebuah amandemen untuk Aden mulai berlaku untuk pemilu bulan Desember 1955. Konstitusi selanjutnya dibuat tahun 1959 untuk memilih 12 orang calon Dewan Legislatif. Pemerintah kolonial menginginkan adanya pembangunan kilang minyak dan sistem pelayaran khusus untuk melayani lalulintas perdagangan minyak di Aden. Pemerintah menjamin bahwa Aden tetap menjadi pelabuhan bebas. Pada tahun 1957, pelabuhan Aden merupakan pelabuhan ke-4 setelah London, Liverpool, dan New York dalam hal jumlah pelayaran. Industri-industri lokal kemudian diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu seiring dengan meningkatnya populasi. Sehingga pada tahun ini juga, pemerintah kolonial menjadikan Aden sebagai basis militer terbesar di luar Eropa.

Kemakmuran yang terus menerus bertambah mengakibatkan pemerintah membangun fasilitas-fasilitas kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan perkotaan yang saat itu merupakan sistem pelayanan sosial terbaik di kawasan Arab. Mayoritas pendatang yang bekerja di Aden berasal dari daerah utara dan dari wilayah negara Arab lainnya yang jumlahnya melebihi jumlah penduduk asli Yaman di Aden.

Pada tanggal 16 Januari 1961, Sir Charles Johnston, Gubernur Aden, mengumumkan pembentukan suatu asosiasi yang dekat dengan daerah protektorat Aden Barat dan Utara. Federasi ini kemudian disebut Federasi Arab Selatan bulan April 1962. Federasi ini terdiri dari 18 emirat dan kesultanan (enam diantaranya adalah emirat di bagian barat dan timur). Aden kemudian ditetapkan sebagai daerah di luar federasi sampai dengan bulan September 1962, ketika diadakan suatu pemilihan suara.

Pada tanggal 30 Nopember 1967, Aden dan daerah Protektorat Arab Selatan menjadi merdeka, keluar dari persekarmuran dan diberi nama People's Democratic Republic of Yemen (PDRY).²⁶

2.4.4. Yaman Modern (Abad 20 M)

Meskipun pasukan Turki yang tersebar hampir berjumlah 100 ribu dan mampu menghancurkan pasukan di pihak Imam Yahya, Turki tetap khawatir bahwa pasukannya nantinya akan ditarik dari wilayah ini karena invasi Italia di Tripoli dan perang di wilayah Balkan. Perang dan negosiasi dengan Turki berlanjut sampai tahun 1911 ketika sebuah persetujuan rekonsiliasi dicapai (Rekonsiliasi Da'an). Menurut persetujuan ini, Kesultanan Ottoman harus mengakui wilayah kekuasaan lokal Imam Yahya.

Pendudukan Turki berakhir ketika terjadi gencatan senjata tahun 1918. Pada tahun 1919, Imam Yahya memimpin revolusi besar yang mengakibatkan terciptanya sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa wilayah Yaman dibagi menjadi dua, yaitu wilayah kekuasaan Imam di dataran tinggi, dan Turki di Tihama. Perjanjian ini berakhir dengan pengambilalihan semua wilayah oleh Imam Yahya termasuk Sana'a, kecuali daerah yang telah disetujui berada di bawah kekuasaan Turki di Tihama, Assyr, Taiz, dan Haraz.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat itu disusul dengan adanya Perang Dunia I membuat pengaruh Imam Yahya bertambah luas dan menguasai sisa-sisa wilayah termasuk Tihama, Taiz, dan wilayah timur di Mareb dan Al Beidha. Tahun 1921, pasukan Imam Yahya mendapatkan kembali kekuasaan di wilayah Tihama dan mulai bergerak ke utara untuk mendapatkan wilayah Assyr kembali.

Perjanjian Luzan tanggal 24 Juli 1923, menyatakan hak-hak manajerial Imam Yahya terhadap kepemilikan Ottoman di Yaman. Peta pertama dibuat dan mencakup empat wilayah: Sana'a, Assyr, Taiz, dan Hodeida yang dibatasi oleh laut Merah di bagian barat, Al Hijaz dan Najd Timur Laut (di bawah Al Basra) di bagian utara. Hal ini menimbulkan adanya banyak perselisihan wilayah

²⁶ REF. *Year Book Mid. The Middle East and North Africa, 37th.Ed.* 1990, Europe Publication LTD., England, hal. 949.

protektorat antara Turki dengan Inggris, kemudian antara Imam Yahya dengan Inggris.²⁷

Dengan adanya perjanjian Mekkah yang ditandatangani bulan Oktober 1926, Assyr berada di bawah kekuasaan Ibn Sa`ud yang kemudian menjadi raja di Saudi Arabia. Tahun 1930, terjadi perselisihan di perbatasan utara. Hal ini dipergunakan Imam Yahya untuk membujuk penguasa di Assyr untuk melakukan revolusi melawan Ibnu Sa`ud.

Tahun 1933, Imam Yahya sadar akan adanya kemungkinan perang dengan Ibnu Saud di perbatasan sehingga Imam Yahya akhirnya mengakhiri perselisihannya dengan Inggris. Dalam perjanjian Sana`a yang ditandatangani bulan Pebruari 1934, Imam Yahya secara diam-diam menerima perjanjian antara Inggris dan Turki meski hanya sebatas mengizinkan pemerintah Aden untuk menjadi penguasa di wilayahnya saja. Untuk menghormati klaim-klaim itu, tidak ada lagi pembatas yang sebelumnya didirikan, dan tidak ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang sering meresahkan dari pihak militer terhadap warga sipil di daerah perbatasan. Perjanjian ini menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan tentang garis batas selama 40 tahun sampai masalah ini didiskusikan lagi. Inggris akhirnya menaikkan status Imam Yahya dan mengakuinya sebagai raja.²⁸

Usaha-usaha untuk mendamaikan perselisihan antara Imam Yahya dan Ibnu Sa`ud diadakan. Pada bulan April 1934, Ibnu Saud membalas perbuatan Imam Yahya dengan memasuki Yaman dan Faisal (putra Ibnu Sa`ud) membuat pasukan Yaman keluar dari Hodeida. Usaha penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mengadakan negosiasi dan menghasilkan perjanjian Al Tayef tahun 1934, yang terdiri dari 23 artikel. Isi dari perjanjian itu antara lain gencatan senjata, membentuk garis pemisah antar-masing-masing negara, memberikan bagian Tihama dan Najran kepada Ibnu Sa`ud, larangan untuk menjadikan daerahnya sebagai basis negara manapun. Persetujuan ini juga berisi pernyataan tentang persaudaraan dan hubungan pertetanggaan yang baik dan masing-masing pihak harus saling menjaga jarak tentang masalah penggunaan senjata untuk

²⁷ *Republic Of Yemen*, 2000, op. Cit., hal. 61.

²⁸ *REF Year Book Mid*, 1991, op. Cit., hal. 990.

menyelesaikan tiap masalah. Singkatnya, pihak Saudi Arabia akhirnya memenangkan pertempuran dan menguasai daerah Assyr, Jayzan, dan wilayah Tihama termasuk Hodeida.

Kelaliman dan sikap konservatif dari Imam Yahya terus berlanjut sampai dengan berakhirnya masa pemerintahannya bulan Pebruari 1948. Hal ini sehubungan dengan peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah al Wazir mengakibatkan pembunuhan atas dirinya. Sebagai penerusnya, putra Imam Yahya: Saif al Islam Ahmad, menangkap para pemberontak, menghukum dan memenjarakan mereka. Sejak saat itu, Yaman membuka suatu hubungan kerja sama dengan banyak negara di dunia. Pada bulan Januari 1951, suatu awal hubungan dibuat untuk pembangunan negara dengan bantuan teknis dari Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Pada saat yang sama, suatu hubungan diplomatik total didirikan dengan negara lain termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Mesir.

Pada bulan April 1955, sebuah percobaan pembunuhan yang gagal terjadi terhadap Imam Ahmad yang dilakukan oleh angkatan bersenjata sendiri. Pada bulan Agustus, Imam Ahmad mendirikan sebuah kabinet yang resmi. Sepanjang tahun 1956, hubungan-hubungan dibentuk dengan USSR dan suatu pakta militer dengan Mesir, Saudi Arabia, dan Syiria ditutup.

Perselisihan perbatasan yang terjadi antara Inggris-Yaman berlanjut sampai dengan tahun 1957 ketika pihak Yaman dilaporkan menyerbu desa-desa di daerah protektorat Aden. Meskipun ada sebuah upaya damai pada bulan Nopember tahun itu, tetapi perselisihan terjadi kembali di bulan Mei 1958 ketika terjadi dua peristiwa pemboman yang akhirnya membuat pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat.

Pada saat yang hampir bersamaan, pada bulan Pebruari 1958, dibentuklah suatu persatuan antara Syria, Mesir dan Yaman yaitu United Arab Republic (UAR). UAR ini kemudian dibubarkan bulan Desember 1961.

Bulan Mei 1959, terjadi kekacauan menyusul kepergian Imam Ahmad ke Eropa. Putranya, Muhammad Al-Badr menggantikannya dan memperkenalkan suatu kebijakan yang baru termasuk adanya inovasi tentang dibentuknya sebuah dewan perwakilan untuk rakyat. Tetapi kebijakan ini terpaksa diundur

pelaksananya sampai dengan kepulangan Imam Ahmad dari luar negeri bulan Agustus.²⁹

2.4.5. Daerah Protektorat Arab Selatan

Di sekitar Aden, ada sebuah daerah dengan luas hampir 1000 km² di sepanjang pantai yang terdiri dari 20 negara bagian yang terbentuk antara tahun 1882-1914. Daerah tersebut masuk ke dalam sebuah perjanjian perlindungan keamanan dengan pemerintah Inggris yang intinya mengakui kewenangan gubernur Aden atas daerah protektorat ini.

Banyak negara yang kemudian masuk dan menjadi bagian dari perjanjian ini. Perjanjian ini umumnya menyatakan bahwa untuk sementara pemerintah Inggris menahan hak kemerdekaan masing-masing negara bagian atas masalah internal mereka dan atas hak teritorial mereka. Para penguasa dari masing-masing negara bagian harus menerima pejabat perwakilan Inggris dan pejabat-pejabat politik Inggris yang ditunjuk oleh gubernur. Sebagai gantinya, Inggris menjamin perlindungan keamanan kepada negara-negara ini dan setuju untuk tidak memberikan daerah mereka kepada penguasa-penguasa asing lain.

Inggris menduduki Aden tanggal 19 Januari 1839 dan menguasai daerah-daerah kesultanan di selatan (Aden, Lahj, Shabwa, Hadramaut, dan Al Mahara). Pada saat awal pendudukannya di Aden, Inggris membuat sebuah perjanjian perdamaian dan kerja-sama yang sebenarnya mempunyai arti kekuasaan yang lengkap atas daerah-daerah itu. Banyak perjanjian yang ditandatangani tidak lain agar Inggris dapat menguasai wilayah selatan, termasuk perjanjian terakhir yang ditandatangani dengan Sultan Lahj, Ali Abdulkarim Fadl tahun 1952.

Inggris menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari suku-suku di daerah selatan dan timur, Turki, dan Yaman. Imam Yahya menginginkan daerah Yaman Selatan kembali seperti asalnya sehingga beliau mencoba untuk menduduki Al Sha`ab, Al Aja`Ad, dan Al Qatib setelah perang dunia I. Usaha ini akhirnya gagal karena kuatnya pendudukan Inggris yang disertai dengan serangan bombardir udara yang menembaki daerah pemukiman di Huraib, Al Beidha,

²⁹ *REF Year Book Mid.*, 1990, *op. Cit.*, hal. 944.

Qa`taba, dan kota-kota lainnya. Sehingga hal ini mengundang rasa penyesalan dari berbagai masyarakat, baik regional maupun internasional. Akibatnya, dibuatlah sebuah perjanjian kerja sama dengan Inggris tanggal 11 Pebruari 1934. Isi perjanjian ini antara lain bahwa Inggris harus mengakui kemerdekaan Yaman dan mengakui Imam Yahya sebagai raja di Yaman. Wilayah-wilayah di bawah protektorat Inggris ditentukan secara nyata sampai dengan negosiasi selanjutnya yang berlaku selama 40 tahun.

Ketika Inggris mendirikan Federasi Arab Selatan, pemerintah Yaman melihat hal ini sebagai suatu pelanggaran terhadap persetujuan yang dibuat sebelumnya yang dapat mengarah kepada perubahan status quo. Maksudnya, Inggris berusaha untuk mengkonsolidasikan lagi kedudukannya atas wilayah jajahannya di Yaman Selatan dengan menciptakan suatu daerah baru.

Inggris menuntut didirikannya persatuan negara Arab Selatan tahun 1962, sehingga hal ini melanggar resolusi PBB No. 1514 tanggal 14 Desember 1960, dan No. 1954 tanggal 25 Nopember 1961. Dua resolusi ini sebenarnya mendorong berakhirnya pendudukan asing dan menghadiahkan sebuah kemerdekaan kepada semua bangsa yang belum merdeka di seluruh dunia. Selain itu, resolusi ini juga menyatakan pelepasan tawanan perang dan membuat suatu pemilihan suara sebagai sebuah langkah maju sebagai buah dari kemerdekaan yang lengkap. Bagaimanapun juga, Inggris menerjemahkan sendiri isi resolusi itu dan menuntut untuk dapat menentukan sendiri tentang sebuah kelahiran negara Arab Selatan yang sekaligus memecah wilayah barat daya Arab sehingga lepas dari tanah airnya.³⁰

2.4.5.1. Negara Bagian Protektorat Timur

Daerah ini terdiri dari Hadramaut (yang terdiri dari negara bagian Quaiti, Shihr, dan Mukalla, dan negara bagian Kathiri di Sai`un), Kesultanan Mahra di Qish dan Socotra, Kesultanan Wahidi di Balhaf dan Bir Ali, dan kesultanan Irqa dan Haura.

³⁰ *Republic of Yemen.*, 2000, *op. Cit.*, hal. 62-63.

Tahun 1937 dan 1938, sultan Quaiti dan kathiri setuju untuk menandatangani perjanjian dengan Inggris yang isinya menerima nasehat dari perwakilan Inggris untuk semua bidang kecuali bidang agama. Perwakilan Inggris untuk daerah Protektorat Arab Timur ditempatkan di Mukalla. Pada tanggal 1 Juli 1966, populasi total di area ini mencapai 326.000 jiwa.

2.4.5.2. Negara Bagian Protektorat Barat

Terdiri dari 17 negara bagian, lima negara diantaranya pada tahun 1944 dan 1945 menyetujui perjanjian dengan Inggris untuk menerima Gubernur Aden yang bertugas mengurus administrasi kesultanan Fadli, Aulaqi Bawah, dan Yafi'i Bawah, Baihan dan Amir di Dhala. Populasi pada tanggal 1 Juni 1966 mencapai 570.000.

2.5. Revolusi-Revolusi Besar di Yaman

2.5.1. Revolusi 26 September 1962

Adanya aksi dari sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai perwira bebas yang terbentuk antara bulan Desember 1961 sampai dengan September adalah sebagai suatu kelompok yang melancarkan revolusi. Protes-protes mahasiswa banyak dilancarkan pada periode ini di kota Sana'a dan Taiz. Protes ini dimulai pada akhir Juni 1962 dengan membawa suatu gelombang ketidakpuasan yang besar dari masyarakat.

Al-Badr kemudian berkuasa menggantikan ayahnya yang terbunuh tanggal 18 September 1962, dan berjanji akan meneruskan kebijakan ayahnya tentang pembentukan suatu negara. Hal ini kemudian memicu aksi dari perwira bebas dan rakyat Yaman untuk mengadakan revolusi pada pagi hari tanggal 27 September 1962.

Adapun tujuan utama dari revolusi ini, adalah:

1. Bebas dari kelaliman, penjajahan, dan sisa-sisanya, mendirikan negara dengan suatu sistem republik yang adil, dan menghapus ketidaksetaraan kelas sosial.

2. Membentuk tentara nasional yang kuat dan mampu menyelamatkan bangsa dan revolusi.
3. Memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, politik, dan standar budaya masyarakat.
4. Membangun sebuah keadilan, demokratisasi, dan hubungan kerja-sama berdasarkan syari'ah Islam.
5. Berjuang demi suatu persatuan nasional yang nyata dengan Persatuan Pan-Arab.
6. Menghormati perjanjian-perjanjian dengan PBB dan organisasi internasional lainnya, mematuhi prinsip-prinsip kenetralan dan nonblok, berusaha untuk menjaga perdamaian dunia dan mendukung prinsip-prinsip perdamaian diantara bangsa-bangsa.³¹

2.5.2. Revolusi 14 Oktober 1963.

Pada akhir 1962, Republik yang baru berdiri ini diakui oleh lebih dari 30 negara. Mesir, pemimpin-pemimpin Pan-Arab serta militernya mendukung konsolidasi revolusi September yang berlangsung selama empat tahun. Revolusi Oktober disebabkan oleh Radfan yang mendeklarasikan kemerdekaan daerah Selatan dan Timur pada tanggal 30 Nopember 1967. Pada tanggal 5 Nopember 1967, sebuah aksi meletus di Sana`a tepat 25 hari sebelum kemerdekaan daerah Selatan tanggal 30 Nopember 1967. Saat itu, Sana`a telah dikepung orang-orang elemen-elemen pro-Imam. Front Nasionalis di Selatan mengambil alih kekuasaan dari Inggris mendeklarasikan kemerdekaan dan menciptakan suatu pemerintahan di Aden.

³¹ Ibid, hal. 65.



BAB,III

FAKTOR-FAKTOR

YANG MENGHAMBAT TERJADINYA

UNIFIKASI YAMAN

Banyak hal yang mempengaruhi lambatnya pencapaian unifikasi. Hal-hal yang menghambat usaha ini antara lain adanya konflik di dalam negeri masing-masing, konflik antardua negara Yaman Utara dan Yaman Selatan, dan adanya pengaruh dari luar antara lain Saudi Arabia dalam hal ini termasuk negara-negara Barat lainnya serta USSR lewat bantuan-bantuan yang diberikannya.

Pada bulan Nopember 1970, sebuah undang-undang yang baru diumumkan di Yaman Selatan. Isinya antara lain peresmian nama baru Yaman Selatan menjadi People Democratik Republik of Yemen (PDRY) dan pernyataan tentang pandangan yang memungkinkan Yaman bersatu.³²

Saat itu hubungan antara PDRY dan YAR (Yemen Arab Republik) atau Yaman Utara sangat sulit untuk diperbaiki karena tidak adanya ideologi yang mendasar antara aliran moderat di Sana'a, dan aliran sosial-radikalis di Aden. Hal ini ditambah lagi dengan ketergantungan bantuan keuangan dari Saudi Arabia dan dari USSR. Sebab-sebab inilah yang antara lain menghambat banyak hal untuk menuju kepada terbentuknya persatuan dua negara ini.³³

Situasi yang terjadi kemudian menjadi lebih intensif sebagai hasil dari pertumbuhan sosial radikalis di Yaman Selatan dan menciptakan gelombang pengungsi yang berjumlah ribuan orang menuju daerah Yaman Utara yang sebagian didanai dan dipersenjatai oleh Saudi Arabia. Hal ini membuat pembagian atas masyarakat Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi tidak jelas dan masing-masing pemerintah saling mendorong pada berkembangnya kaum oposisi

³² REF Year Book Mid, 1990, op. Cit., hal. 953.

³³ Braun Ursula, 1992, *Yemen: Another Case of Unification*, Aussen Politic, vol. 43, no. 2, hal. 175.

di negara lawan.³⁴ Berikut ini adalah penjelasan tentang peristiwa yang mengakibatkan terhambatnya proses unifikasi

3.1. Konflik-Konflik antara PDRY-YAR

Konflik-konflik yang akan dijelaskan di sini adalah konflik-konflik utama yang terjadi pada tahun 1972 dan 1979. Tetapi konflik kecil juga tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi unifikasi dan akan dijelaskan pula secara berurutan.

Konflik pertama yang terjadi antara PDRY dan YAR adalah adanya pertempuran serius yang terjadi di daerah perbatasan dua negara pada bulan September 1972. Awalnya adalah adanya insiden-insiden kecil di perbatasan yang terjadi menyusul adanya serbuan yang akhirnya agak berpengaruh pada hubungan dua negara. Hal ini kemudian ditambah lagi dengan peristiwa penyeberangan syeh-syeh dari suku-suku terkemuka di Utara ke daerah Selatan yang kemudian terbunuh bersama dengan 60 orang pengikutnya. Di Sana'a, pejabat-pejabat dari angkatan darat yang sebagian didanai oleh Saudi Arabia diminta untuk berperang mengakhiri komunisme di daerah Yaman Selatan. Peristiwa yang terjadi berikutnya adalah bertambah pentingnya agresi sehingga pada bulan September 1972, terjadi perluasan wilayah pertempuran. Pertempuran kali ini berlangsung selama beberapa hari untuk merebut daerah Kamaran. Suatu misi penengah dari Liga Arab kemudian melakukan usaha-usaha perdamaian dan gencatan senjata pada tanggal 28 Oktober 1972. Perjanjian ini ditandatangani di Kairo dan salah satu isi dari perjanjian ini adalah menginginkan adanya negara tunggal yang menyatu di bawah satu bendera, satu ibu kota, satu kepemimpinan, satu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³⁵ (Selengkapnya akan dijelaskan pada Bab IV)

Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama karena pada bulan September 1973, keadaan ini semakin memburuk sehingga keputusan untuk merencanakan unifikasi antara dua negara ini menjadi semakin jauh dari yang diharapkan dan

³⁴ *REF Year Book Mid.*, 1991, op. Cit., hal. 994.

³⁵ *Ibid.*

menjadi ditunda satu tahun kemudian. Pada musim semi 1975 pemerintah YAR menuduh PDRY bertanggung jawab atas aksi sabotase di daerah perbatasan.³⁶

Sekitar tahun 1977-1978, gelombang pembunuhan membayangi dua negara ini. Hal ini kemudian memicu kerusuhan karena masing-masing pemerintah dua negara itu meluncurkan suatu kampanye propaganda melalui berbagai media sehingga keadaan menjadi lebih memanas.

Pada bulan Juli 1977, Presiden YAR Ibrahim al Hamadi menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh suku-suku di utara dari para pendukung para imam terdahulu. Pada bulan Oktober, Hamadi terbunuh di Sana'a dan tidak diketahui tentang siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Letkol Ahmad Ibn Hussain Al Ghasmi, salah seorang anggota dewan komando militer kemudian mengambil alih kepemimpinan. Di bawah penguasa ini, YAR menjadi sangat tergantung pada bantuan Saudi Arabia; negara tetangga yang sepertinya tidak menginginkan adanya unifikasi dengan PDRY meskipun diskusi-diskusi tentang unifikasi antara dua negara ini terus berlangsung.

Aksi pembunuhan terhadap presiden YAR kembali terjadi tanggal 24 Juni 1978. Kali ini yang menjadi korban adalah Presiden Ahmad Ibn Hussain al Ghasmi. Peristiwa ini kemudian mendorong jatuhnya Presiden Salem Rubai Ali dari PDRY dari kursi kepresidenannya dua hari kemudian. Al Ghasmi terbunuh oleh ledakan bom yang terdapat di dalam tas yang dibawa oleh utusan khusus PDRY yang juga ikut tewas karena ledakan itu. YAR yang sekarang dipimpin oleh Kol. Ali Abdullah Saleh menuduh Aden atas terbunuhnya Ghasmi dan mengklaim PDRY bertanggung jawab dan mencurigai Rubai Ali ada hubungannya dengan peristiwa ini. YAR kemudian mempengaruhi negara-negara lain untuk membekukan hubungan dengan PDRY. Apakah hal ini memang benar direncanakan oleh Presiden Rubai Ali atau peristiwa ini memang telah diatur sedemikian rupa oleh kekuatan-kekuatan lain di PDRY untuk mendiskreditkan Rubai Ali, tidak ada penjelasan yang pasti. Rubai Ali kemudian dihukum dan dipecat dari jabatannya sebagai presiden.³⁷

³⁶ *REF Year Book Mid.*, 1990, op. Cit., hal. 953.

³⁷ *Ibid*, hal. 946.

Konflik internal kemudian meletus antara tentara-tentara yang setia pada Rubai Ali dan milisi-milisi dari partai yang baru berkuasa. Pertempuran ini masih terus berlangsung meskipun presiden yang baru telah mengambil alih kekuasaan dari presiden yang terdahulu. Perdana Menteri Ali Nasser Muhammad menjadi kepala negara sementara dan politik luar negeri PDRY mulai condong ke Uni Soviet dan sekutu-sekutunya.³⁸

Bulan Juli 1978, pertempuran kembali pecah di daerah perbatasan dua negara. PDRY menuduh YAR atas penyerbuan yang terjadi di wilayah utara. Ketegangan terjadi antara dua negara ini karena masing-masing pihak memperlakukan penambahan unit-unit militer di sepanjang perbatasan meski telah diusahakan agar ketegangan ini tidak memuncak dan menjadi peperangan terbuka.

Pada bulan September 1978, Presiden Saleh selamat dari percobaan pembunuhan karena suatu kudeta yang dilakukan oleh pejabat militer senior pada bulan Oktober yang diduga mendapat dukungan dari luar. Kecurigaan akan ikut campurnya PDRY dalam peristiwa-peristiwa ini menambah ketegangan hubungan antara dua negara. Antara bulan Oktober 1978 sampai dengan Januari 1979, pemerintah YAR berulang kali menyalahkan atau menuduh PDRY atas kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di perbatasan dan banyaknya aksi sabotase wilayah.³⁹

Konflik ke-2 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan terjadi pada bulan Februari 1979. Konflik tersebut semakin meluas di sepanjang perbatasan sehingga membuat pihak Liga Arab sekali lagi berusaha untuk menengahi konflik tersebut. Persetujuan tentang gencatan senjata pun dicapai, dilanjutkan dengan suatu perjanjian untuk mengembalikan kondisi dua negara seperti semula.⁴⁰

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi secara sporadis pada bulan-bulan terakhir menjadi perang terbuka selama Februari sampai Maret 1979. Suatu kelompok yang menamakan dirinya National Democratik Front (NDF - kelompok

³⁸ *REF Year Book Mid.*, 1990, loc. Cit.

³⁹ *REF Year Book Mid.*, 1990, loc. Cit.

⁴⁰ *Republic Of Yemen*, 2000, op. Cit., hal. 66.

gerilya yang berbasis di Aden) melakukan aksi-aksi yang sangat mengganggu banyak daerah di YAR. Sebuah tim penengah yang terdiri dari Syria, Jordania, dan Iraq mengusahakan suatu gencatan senjata pada tanggal 2 Maret. Gencatan senjata gagal dilaksanakan dan pertempuran kembali pecah dan semakin parah. Liga Arab kemudian berusaha untuk menengahi dan memimpin langsung pelaksanaan penarikan pasukan dari pendudukan wilayah pada pertengahan Maret.⁴¹

Pada bulan tersebut, ketika dunia dipenuhi dengan berita-berita tentang kejatuhan Syeh Iran dan adanya perang antara Cina dan Vietnam, PDRY menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk menyerang Yaman Utara dan berusaha untuk mempersatukan daerah Yaman Utara dengan Yaman Selatan secara paksa. Kemudian pihak YAR mulai mengadakan perlawanan, sehingga situasi menjadi memanas. Tanggal 30 Maret 1979, negara-negara Arab lainnya berusaha untuk menghalangi memburuknya situasi ini dan mengusahakan suatu perdamaian. Kemudian suatu perjanjian pun dibuat dan disetujui di Kuwait. Isi perjanjian ini adalah tentang suatu usaha perdamaian Yaman Utara dan Yaman Selatan serta kesediaan dua negara tersebut untuk bersatu; suatu perjanjian yang isinya hampir sama dengan perjanjian tujuh tahun sebelumnya di Kairo.⁴²

Konflik kembali terjadi pada tahun 1982 antara National Democratic Front (NDF) dan YAR. NDF sendiri adalah sebuah front nasional yang didukung secara moral dan keuangan oleh pemerintahan PDRY. Pada bulan April, NDF dapat menguasai kota Juban di YAR ± 10 km dari perbatasan antara PDRY dan YAR. Meskipun aksi ini berakhir dengan gencatan senjata, tetapi hal ini hanya bersifat sementara karena pada bulan Mei, pihak YAR melakukan serangan militer balasan terhadap NDF.

Terjadi banyak perselisihan tentang lokasi yang tepat atas perbatasan yang tidak pernah bisa ditentukan secara pasti itu. Hal ini terjadi karena diduga di wilayah Shabwa (daerah perbatasan antara PDRY dan YAR) terdapat sumber minyak dengan jumlah yang menjanjikan. Pada bulan Desember 1987, Perdana

⁴¹ *REF Year Book Mid.*, 1990, loc. Cit.

⁴² *REF Year Book Mid.*, 1991, op. Cit., hal. 995.

Menteri YAR DR. Abd al Karim al Iryani menyangkal adanya perselisihan bersenjata yang telah terjadi di sekitar perbatasan, tetapi pada bulan April 1988, diberitakan bahwa pihak Yaman Utara dan Yaman Selatan saling memperkuat keberadaan pasukannya di daerah perbatasan.⁴³

Orientasi yang Islamis dan adanya struktur sosialis tradisional terus berlanjut di Yaman Utara. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa para intelektual-intelektual muda lebih bertujuan pada aktivitas politik sayap kiri mereka. Pemerintah Yaman Selatan sangat mendukung kelompok-kelompok ini, sedangkan pemerintahan Yaman Utara merasa harus menentang kekuatan-kekuatan ini untuk dapat lebih mengkonsolidasikan kondisi negaranya menjadi lebih baik.⁴⁴

3.2. Konflik dalam Negeri

3.2.1. Yemen Arab Republic (Yaman Utara)

Bulan Juli 1971, terdapat rumor tentang usaha-usaha penggulingan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat militer senior sehingga beberapa pejabat itu kemudian diberhentikan. Sistem pemerintahan yang berganti-ganti ini secara otomatis menjadi penghambat terbentuknya unifikasi dua negara.

Pada tanggal 13 Juni 1974 terjadi kudeta tidak berdarah di YAR ketika junta militer yang terdiri dari tujuh orang yang pro-Arab Saudi di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Ibrahim Al Hamadi mengambil alih kekuasaan. Hamadi kemudian mencabut konstitusi dan Dewan Pertimbangan, membubarkan komando tertinggi angkatan bersenjata dan usaha persatuan nasional Yaman. Hamadi menyatakan bahwa kudeta ini diperlukan untuk mengatasi kekacauan ekonomi dan kekacauan pemerintahan yang terjadi. Presiden terdahulu, Qadi Abd ar Rahman Al Iriani kemudian meninggalkan Yaman menuju Damascus. Tanggal 19 Juni, sebuah konstitusi sementara dibuat dan dua hari kemudian sebuah konstitusi baru dibuat di bawah kepemimpinan Mohsin Al Aini. Kebijakan

⁴³ Ibid, hal 998.

⁴⁴ Braun Ursula, 1992, op. Cit., hal. 175.

pemerintah yang baru ini isinya antara lain membuka hubungan yang baik untuk semua negara Arab, mendukung gerakan NonBlok dan setia pada isi perjanjian Liga Arab dan PBB. Tujuan utamanya yaitu untuk bersatu dengan PDRY yang akan segera dipersiapkan dan pertemuan-pertemuan untuk membahas hal itu akan terus dilakukan.⁴⁵

Muncul spekulasi bahwa akan ada pengumuman penting tentang unifikasi ketika Hamadi mengunjungi Aden bulan Oktober 1974. Tetapi peristiwa yang terjadi kemudian adalah terbunuhnya Hamadi dua hari sebelum keberangkatannya menuju Aden. Unifikasi kembali terhambat untuk yang kesekian kalinya.

Sampai dengan bulan Mei 1978, banyak berita tentang pemberontakan melawan Presiden Al Ghasmi yang dipimpin oleh Mayor Abdullah Abd Al Alem di daerah selatan YAR. Alem menjadi salah satu anggota dewan kepresidenan Al Ghasmi yang setelah terjadi pemberontakan pergi ke PDRY.

Setelah adanya ledakan bom di masjid raya Sana'a tahun 1989, tiga orang dari kelompok fundamentalis bernama "Persaudaraan Muslim" (Moslem Brotherhood) dihukum. Kemudian timbul kegelisahan dari suku Zaidi akan semakin menjadi mayoritasnya suku Shafai jika unifikasi Yaman terbentuk. Tetapi pemimpin-pemimpin agama tetap melanjutkan penghormatannya terhadap Yaman Selatan sebagai negara yang beraliran komunis-atheis dan tetap melawan terbentuknya unifikasi.⁴⁶

Sikap yang ditunjukkan oleh para imam tersebut menggambarkan bahwa ide tentang unifikasi ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari semua kalangan. Ketika proses unifikasi mulai dipersiapkan di tingkat pemerintahan, pihak-pihak yang tidak setuju mulai menentangnya. Suku-suku di daerah Utara khawatir bahwa resiko adanya unifikasi akan memperlemah posisi mereka dengan adanya gabungan kekuatan YAR dan PDRY di tingkat pemerintahan pusat, penambahan kekuatan dari angkatan bersenjata Yaman Selatan yang berperlengkapan lebih bagus dan canggih, juga kebencian sekaligus penghormatan mereka terhadap

⁴⁵ *REF Year Book Mid*, 1990, op. Cit., hal. 946.

⁴⁶ *REF Year Book Mid*, 1991, op. Cit., hal. 995.

kaum Sosialis, Atheis dan Komunis, di Aden yang dianggap mewakili kemunduran standar moral kehidupan beragama mereka. Suku-suku ini kemudian bersatu dengan kekuatan Islam yang ada untuk melakukan demonstrasi menentang unifikasi.⁴⁷

Pada awal tahun 1990, kelompok “Persaudaraan Muslim” ini menginginkan hukum “syariah” harus dicantumkan dalam Undang-Undang Yaman yang baru seperti pada Undang-Undang YAR dan menolak draf undang-undang yang sedang dibuat karena dinilai tidak semata-mata berdasarkan hukum syariah. Pemimpinnya, Syeh abd al Hamid Zaidani melakukan boikot atas referendum undang-undang untuk unifikasi ini.⁴⁸

3.2.2. People Democratic Republic of Yemen (Yaman Selatan)

Pertentangan melawan terbentuknya unifikasi yang terjadi di YAR ternyata tidak terjadi di PDRY. Setidaknya hal ini terlihat dari adanya sebuah partai (Organization for the Custody of Yemeni Unification-OCYU) yang dibentuk untuk pencapaian unifikasi Yaman dan untuk melawan kelompok-kelompok di YAR yang menentang unifikasi.

Pertentangan yang ada sebenarnya hanya memasalahkan eksekusi unifikasi ini nantinya. Banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para wanita karena takut bahwa kemunculan aliran Islam yang fundamentalis akan dapat membahayakan kemerdekaan mereka sebagai wanita dan bahwa nantinya akan banyak persyaratan tentang keberadaan hak-hak mereka di negara sekuler PDRY yang nantinya akan dijamin oleh undang-undang negara Yaman yang baru.⁴⁹

Pada bulan Oktober 1977, Presiden Rubai Ali mencoba untuk tetap menjalin hubungan dengan pihak Uni Soviet dan RRC. Hal ini membuat pihak Ismail marah karena Ismail menginginkan adanya hubungan yang eksklusif dengan pihak Uni Soviet dan Cuba. Kebijakan luar negeri PDRY kemudian diikuti oleh masalah-masalah pertarungan kekuasaan antara dua pemimpin utama PDRY ini.

⁴⁷ Braun Ursula, 1992, op. Cit., hal 177.

⁴⁸ REF Year Book Mid, 1990, op. Cit., hal. 949.

⁴⁹ Ibid, hal. 947.

Setelah Raja Faisal dari Saudi Arabia mangkat, hubungan diplomatik dengan Saudi Arabia terbentuk. Pada bulan Agustus 1977 Presiden Ali Nasser Muhammad berkunjung ke Riyadh. Hubungan dengan Inggris diperbaiki dan kilang minyak di Aden diambil alih dengan suatu perjanjian.

Setelah peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Ghasmi tahun 1978, Ismail yang selama ini menjadi rival Ghasmi dalam pemerintahan, memerintahkan untuk melakukan suatu penyerangan. Dalam hal ini, Ismail menyatakan bahwa elemen-elemen dari Uni Soviet dan Cuba ikut andil dalam hal ini. Di istana negara, Rubai Ali ditahan, dan dinyatakan bersalah atas beberapa kasus penembakan dan kejahatan lainnya.⁵⁰

Pada bulan Januari tahun 1986, terjadi kerusuhan politik ketika rezim Ali Nasser Muhammad digulingkan oleh fraksi Marxist radikal yang disebabkan oleh bertambah parahnya kerusuhan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Kerusuhan ini berpusat di Aden dan diperkirakan mengakibatkan kerusakan sekitar \$120 juta. Calon-calon pemimpin dikurangi dan kekuatan angkatan bersenjata yang ada diperlemah. Sebanyak 10.000 orang terbunuh, dan para pekerja asing yang bekerja di PDRY dievakuasi. Teknisi-teknisi dari luar negeri dipulangkan, pekerja lokal yang tidak sempat melarikan diri ke luar negeri banyak yang terbunuh. Hal ini kemudian memicu gelombang imigran baru ke Yaman Utara.⁵¹ Setelah masalah ini mereda, pemerintah banyak membutuhkan bantuan internasional untuk membangun kembali kota Aden dan daerah-daerah lainnya yang rusak akibat kerusuhan ini.

Setelah peristiwa runtuhnya Uni Soviet, terjadi perubahan keadaan secara total. Pada bidang ekonomi, Yaman Selatan secara drastis mengalami kemunduran dan sekaligus kekurangan dukungan dari negara-negara Sosialis. Hal ini akhirnya membuat PDRY “mengubah” haluan politiknya sehingga menjadi lebih dekat dengan negara-negara Arab tetangganya, salah satunya adalah Saudi Arabia.

⁵⁰ *REF Year Book Mid.*, 1991, op. Cit., hal 994.

⁵¹ Braun Ursula, 1992, op. Cit., hal. 175.

3.3. Hubungan Luar Negeri YAR

3.3.1. Hubungan YAR dengan Negara Blok Barat dan Saudi Arabia

Ditinjau dari hubungan internasionalnya, Presiden Abd ar Rahman al Iriyani berhasil menciptakan suatu hubungan yang baik dengan semua negara Arab juga dengan negara-negara Barat tanpa menjalin suatu persekutuan yang bersifat khusus dengan pihak Uni Soviet. YAR layak digambarkan sebagai negara netral, meskipun pemerintahannya sangat tergantung pada bantuan keuangan dari Saudi Arabia.

Sebenarnya, bantuan-bantuan yang diberikan pihak Saudi Arabia terhadap YAR juga diberikan secara individu kepada orang-orang atau kepala-kepala suku yang berpengaruh dan mendominasi Dewan Pertimbangan Negara. Hal ini dimaksudkan agar dapat merintangai usaha-usaha atau gerakan-gerakan menuju penyatuan/unifikasi dengan pihak Yaman Selatan yang sebelumnya telah disetujui tahun 1972.

Kaum konservatif di Sana`a yang mempunyai hubungan dengan Saudi Arabia menciptakan suatu peristiwa yang mengganggu jalannya proses unifikasi ini ketika bulan Mei 1973 pihak yang menentang unifikasi dibunuh. Peristiwa ini kemudian diyakini adalah bahwa Adenlah yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Setelah terbunuhnya Hamadi tahun 1974, kepemimpinan YAR dipegang oleh Letkol. Ahmad Ibn Hussein al Ghasmi. Di bawah pemerintahan Ghasmi, hubungan YAR dengan negara Saudi Arabia dan wilayah deteritorialat Aden menjadi lebih dekat.⁵²

Selama tahun 1975, ada tanda-tanda bahwa YAR semakin mendekati pihak Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Pada bulan Agustus, Saudi Arabia memberi 810 juta riyal untuk mendukung anggaran belanja YAR dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Bulan April 1976, Saudi Arabia menanggung biaya perlengkapan kemiliteran YAR dengan membeli persenjataan dari Amerika

⁵² REF Year Book Mid, 1991, loc. Cit.

Serikat. Pada saat yang sama, YAR menolak bantuan militer yang ditawarkan oleh Uni Soviet sehingga hubungan antara dua negara ini menjadi dingin.⁵³

Bulan Mei 1977. Sebuah perusahaan penerbangan yang merupakan gabungan antara YAR dan Saudi Arabia didirikan untuk tujuan mengambil alih perusahaan yang telah ada: *Yemenia* dengan modal 30 juta riyal.⁵⁴

Hubungan antara YAR dan Amerika Serikat semakin erat sejak pembelian peralatan militer dan persenjataan dari Amerika Serikat seharga 160 juta poundsterling pada bulan Maret 1979 dan mengakhiri kontrak perjanjian persenjataan dengan Uni Soviet.⁵⁵

Peralatan militer yang dibeli YAR dari Amerika Serikat selalu bertambah dengan dana dari Saudi Arabia. Ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya Saudi Arabia dan Amerika Serikat mempunyai tujuan untuk mengurangi pengaruh Uni Soviet di YAR. Meskipun Uni Soviet adalah pendonor utama dalam persenjataan, tetapi pihak Saudi Arabia dan Amerika Serikat tetap berusaha menyediakan kebutuhan akan persenjataan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk YAR. Negara yang termasuk di dalamnya adalah Belanda, Jerman Barat, Inggris dan Jepang.⁵⁶ Pada tahun 1981 diperkirakan total bantuan dari Jerman Barat adalah sekitar \$20 juta/tahun sedangkan bantuan dari Belanda dan Amerika Serikat berjumlah \$13 juta/tahun.⁵⁷

Kedekatan YAR dengan negara-negara Barat dan Saudi Arabia terlihat dalam pembangunan proyek jalan raya Sana`a-Taiz-Mekkah yang dibangun dengan menggunakan bantuan Amerika Serikat. Total bantuan yang diberikan 224 juta riyal, termasuk untuk pembangunan jalan raya Sa`ada-perbatasan Saudi Arabia dan Amran-Hajjah yang dibuat tahun 1982. Jalan raya sepanjang 172 km yang menghubungkan Sana`a-Marib dibangun dengan biaya dari Uni Emirat Arab bulan Mei 1984 sejumlah 250 juta riyal, dan diteruskan untuk pembangunan

⁵³ *REF Year Book Mid*, 1990, op. Cit., hal. 946.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 960.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 953.

⁵⁶ *REF Year Book Mid*, 1991, hal. 1009.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 962.

proyek jalan Dhamar-Raa`da, Baida (perbatasan YAR-PDRY) melewati gunung-gunung yang sulit.⁵⁸

Pada tahun 1984, “masa depan” YAR yang disebabkan gempa bumi pada tahun 1983 mulai cerah menyusul adanya bantuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di wilayah-wilayah yang dinilai parah. Saudi Arabia adalah negara donor terbesar yang membantu pelaksanaan perbaikan ini. Donor lainnya, adalah Kuwait dan Oman (68 juta riyal) kemudian Qatar. Sekitar tahun 1988-1989, Saudi Arabia membantu menutupi kekurangan Anggaran Belanja Negara YAR sejumlah 1,824 juta riyal dan meningkat pada tahun 1989 sejumlah 4,748 juta riyal.⁵⁹

Pada saat Presiden Ali Abdullah Saleh dan Raja Fahd dari Saudi Arabia bertemu, Raja Fahd berjanji akan memberi dukungan secara resmi terhadap unifikasi YAR-PDRY. Para pengamat mencatat, bagaimanapun juga, sebenarnya Saudi Arabia mempunyai syarat-syarat khusus tentang suatu bentuk persatuan, demokratisasi Yaman, dan masalah perbatasan YAR-Saudi Arabia di bagian selatan yang akan sangat potensial untuk mengancam stabilitas pemerintahan otokratik di daerah teluk.

Pada bulan April 1990, sebuah laporan media barat yang memberitakan bahwa suku-suku di utara YAR didukung oleh pemerintahan Saudi Arabia melakukan pemberontakan untuk mencegah proses unifikasi. Tetapi laporan-laporan ini dibantah oleh pemerintahan YAR dan Saudi Arabia.⁶⁰

3.3.2. Hubungan YAR dengan Uni Soviet

Pada bulan November 1980, YAR tidak memberikan suaranya pada sidang Majelis PBB tentang sanksi Uni Soviet atas invasinya ke Afganistan. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan Sana`a karena YAR sangat bergantung pada bantuan persenjataan dari Uni Soviet meskipun bantuan ini juga datang dari Amerika Serikat. Tetapi pihak Saudi Arabia tetap meneruskan untuk memberikan bantuan keuangan kepada YAR. Salah satu bentuknya adalah pembayaran gaji/upah 60.000 pekerja dari Yaman Utara yang bekerja di Saudi Arabia.

⁵⁸ *REF Year Book Mid*, 1990, hal. 960.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 961.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 948.

YAR menandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama selama 20 tahun dengan pihak Uni Soviet pada bulan Oktober 1984. Tetapi hal ini tidak berjalan lama karena terhalang oleh mulai beroperasinya industri minyak yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bantuan dari luar negeri.

Uni Soviet membantu pemerintahan YAR dalam bidang industri termasuk pabrik minuman ringan dan produksi aluminium juga membangun pabrik semen di daerah Bajil dengan menggunakan material lokal. Uni Soviet membiayai perluasan pabrik semen itu sampai dengan tahun 1983 dengan kapasitas produksi sampai 250.000 ton/tahun. Tahun 1985, kapasitas produksi mencapai 350.000 ton/tahun. Dan untuk perluasan selanjutnya diusahakan agar produksi tersebut dapat mencapai 500.000 ton/tahun, pemerintahan YAR juga membicarakannya dengan pihak Uni Soviet.

Sebelumnya, pemerintahan YAR sangat menyandarkan bantuan dari negara Blok Timur dan menjalin hubungan yang sangat baik dengan negara pemasok persenjataan dari Uni Soviet. Hal ini dapat dilihat dari mulai awal tahun 1980-an saja, Uni Soviet telah menghabiskan ± \$1 milyar untuk kebutuhan persenjataan dan militer YAR. Tetapi sejak saat itu, pembelian perlengkapan militer dengan jumlah lebih banyak didapat dari Amerika Serikat dengan maksud untuk mengurangi pengaruh Uni Soviet di YAR.⁶¹

3.4. Hubungan Luar Negeri PDRY.

3.4.1. Hubungan PDRY dengan Negara Blok Barat dan Saudi Arabia

Setelah kunjungannya ke Cina tahun 1970 kebijakan Presiden Salem Rubai Ali lebih condong terhadap Cina meskipun pada waktu yang sama Presiden Ali siap menerima bantuan dari Saudi Arabia dan negara Barat lainnya. Hal ini terlihat pada tahun 1976, didirikanlah suatu hubungan diplomatik dengan Saudi Arabia. Sedangkan pada sisi lain, Abd al Fattah Ismail Sekjend National Liberation Front (NLF)-partai terbesar di PDRY-lebih memilih kebijakan model Uni Soviet.⁶²

⁶¹ *REF Year Book Mid.*, 1991, op. Cit., hal. 962.

⁶² *REF Year Book Mid.*, 1990, op. Cit., hal. 953.

Pada akhir Juni 1980, Presiden Muhammad melakukan kunjungan ke Saudi Arabia atas undangan Raja Khalid. Latar belakang dari peristiwa ini adalah bahwa Presiden Muhammad ingin mengurangi atau jika perlu menghentikan ketergantungan bantuan yang hanya semata-mata pada pihak Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, dan ingin membuat PDRY lebih berintegrasi pada keanggotaannya di dunia Arab dan ingin menunjukkan eksistensinya pada negara-negara Arab lainnya.

Pada bulan Juli 1983, PDRY dan Saudi Arabia saling bertukar perwakilan negara (duta besar), suatu peristiwa yang pertama kali terjadi sejak tahun 1977. Adanya perbedaan ideologi membuat frekuensi konflik di perbatasan sering terjadi. Tetapi hubungan diplomatik ini tidak bisa mencegah pertempuran yang terjadi pada bulan Desember 1983 sampai Januari 1984.⁶³

Hubungan PDRY dengan negara Barat yang memburuk tidak hanya karena penghentian bantuan dari Inggris, tetapi juga karena keberhasilan usaha pendekatan oleh negara Blok Timur. Untuk selanjutnya, sumber utama bantuan adalah dari negara-negara sosialis juga dari negara-negara Arab meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. Bulan September 1989, diumumkan bahwa pemerintahan merencanakan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan pihak Amerika Serikat dan untuk selanjutnya dengan pihak Barat.⁶⁴

Membaiknya hubungan dengan pihak negara Barat (dalam hal ini adalah dengan Saudi Arabia) terlihat dengan disetujuinya bantuan untuk pembiayaan pembangunan terminal minyak di pantai Hadramaut yang dihubungkan dengan jalur-jalur pipa ke ladang-ladang minyak di Saudi Arabia pada tahun 1989.⁶⁵

3.4.2. Hubungan PDRY dengan Uni Soviet

Penghentian secara tiba-tiba bantuan dari Inggris setelah penarikan pasukannya pada November 1967, mengakibatkan krisis yang akhirnya memungkinkan pengaruh Blok Timur masuk ke dalam wilayah Yaman Selatan .

⁶³ Ibid, hal. 954.

⁶⁴ Ibid, hal. 968.

⁶⁵ Ibid, hal. 966.

Uni Soviet dan negara-negara sekutunya di bawah suatu perjanjian bulan Februari 1969, menyediakan bantuan secara teknis dan ahli-ahli untuk proyek-proyek yang ada termasuk membantu proyek perikanan. Pada bulan Agustus 1969, sebuah perjanjian disetujui kembali. Perjanjian ini berisi penutupan anggaran untuk bidang irigasi dan pertanian. Sedangkan perjanjian tahun 1967 diperpanjang sampai dengan bulan Februari 1970 termasuk di dalamnya bantuan dalam bentuk barang dan yang bersifat teknis. Sejak saat itulah, Uni Soviet dan sekutunya menjadi partner utama proyek-proyek pembangunan di PDRY dengan suatu rangkaian perjanjian ekonomi. Yaman Selatan mempunyai arti penting bagi USSR dimana Aden merupakan tempat yang strategis dipandang dari sudut militer.

Perubahan yang kemudian terjadi adalah bahwa negara ini menjadi sebuah negara berbentuk republik kerakyatan yang berintegrasi ke dalam negara-negara Blok Timur dengan memasok senjata dan perlengkapan militer lainnya yang lengkap dan super. Hal ini dapat dilihat misalnya Jerman Timur memberi dukungan terhadap keamanan Yaman Selatan atas konflik-konflik yang terjadi.

Sejak akhir 1970-an, pemerintah memberikan prioritas khusus untuk masa depan minyak. Sebuah perjanjian eksplorasi disetujui dengan suatu perusahaan dari Jerman Timur dan Uni Soviet. Uni Soviet membangun jalur pipa minyak sepanjang 230 km dengan kapasitas awal 100.000 barrel/hari untuk keperluan transportasi minyak mentah dari ladang minyak (yang baru ditemukan) di daerah Shabwah ke Bir Ali di Teluk Aden. Pipa-pipa ini dibangun dengan biaya sekitar \$ 473 juta dan pembangunannya akan dimulai bulan Oktober 1989.⁶⁶

Banyak negara Arab konservatif memperhatikan perkembangan hubungan antara PDRY-Uni Soviet. Antara lain adalah situasi di Afrika, dimana PDRY mendukung rezim Uni Soviet di Ethiopia melawan pemberontakan-pemberontakan di Eritrea dan Somalia. Hal ini juga terlihat pada bulan Oktober 1979, ketika PDRY menandatangani suatu perjanjian kerja sama dan persahabatan dengan Uni Soviet yang isinya memberi kekuasaan pada Uni Soviet untuk menempatkan 18.000 pasukannya di PDRY.⁶⁷

⁶⁶ *REF Year Book Mid*, 1991, op. Cit., hal. 985

⁶⁷ *REF Year Book Mid*, 1990, op. Cit., hal. 953.

Banyak negara dari Blok Timur yang menawarkan bantuan untuk PDRY, utamanya untuk pembangunan proyek komunikasi. Hal ini terlihat dengan dibangunnya suatu stasiun televisi Aden atas bantuan Czechoslovakia. Negara lainnya yang membantu pembangunan fasilitas di PDRY adalah Bulgaria tahun 1979, dan Cina yang membantu dengan dana \$12,5 juta. Tahun 1980-an, Czechoslovakia dan Jerman Timur masuk dalam bidang pensurveian minyak, Bulgaria membantu dalam pembangunan fasilitas turis, dan Cina membiayai serta menyelesaikan pembangunan jalan raya.⁶⁸

Pengaruh Uni Soviet di PDRY juga secara otomatis disebarkan dalam bidang politik. Hal ini terlihat pada bulan Mei 1981, Menteri Pertahanan PDRY Brig. Ali Ahmad Nasser Antar dimutasi dan ditempatkan pada posisi Deputi Pertama Perdana Menteri. Hal ini terjadi karena beliau diperkirakan menolak menjalankan tugasnya menjadi penasehat untuk Uni Soviet.

Bulan April 1982, pemerintahan PDRY menandatangani suatu perjanjian bantuan dari Uni Soviet yang isinya Uni Soviet akan membantu proyek-proyek pembangunan di PDRY.⁶⁹ Bantuan Uni Soviet ini antara lain membiayai beberapa proyek utama yang termasuk dalam "Repelita II" (1981-1985), diantaranya adalah proyek untuk pelabuhan di Aden dan pembangunan bandara udara, eksploitasi daerah sumber-sumber perikanan, dan pelaksanaan survey sumber-sumber mineral. Bidang infrastruktur dan perlengkapan militer dari Uni Soviet juga sangat menguntungkan bagi pihak PDRY.⁷⁰

Dalam bidang pertanian, pemerintah memberikan prioritas untuk beberapa proyek pertanian, antara lain dibentuknya suatu lembaga keuangan khusus untuk para petani yang berfungsi sebagai penyedia bantuan ekonomi. Sumber keuangan lembaga ini mayoritas dari bantuan luar negeri utamanya dari negara Blok Timur, dan kemudian disusul Kuwait dan negara-negara Arab lainnya. Negara-negara ini terus membantu dalam hal keuangan dan teknis seperti

⁶⁸ Ibid, hal. 968.

⁶⁹ Ibid, hal. 954.

⁷⁰ Ibid, loc. Cit.

pada proyek irigasi, termasuk pengenalan metode dan peralatan pertanian yang baru.⁷¹

Dalam bidang perikanan, PDRY mempunyai armada ikan nasional berupa kapal penangkap ikan bawah laut sebanyak 17 buah bantuan dari Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Uni Soviet berjanji untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan perikanan di Hedjuff dan di Aden beserta fasilitas pendinginannya.⁷²

Pada bulan Desember 1987, suatu perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis ditandatangani antara PDRY-Uni Soviet. Isinya antara lain pembangunan pelabuhan ikan di Aden dan kompleks perikanan di pulau Socotra. Selanjutnya Uni Soviet mengambil alih pemberian bantuan dari FAO untuk program perikanan empat tahunan sampai dengan tahun 2005.

Bulan Desember 1988, Uni Soviet membantu eksplorasi minyak dan pembangunan sumber air, energi, material bangunan, komunikasi, dan pelatihan sampai dengan tahun 2005. Pada bulan Mei 1989, pemerintah memperbaharui pendirian perusahaan perikanan gabungan antara PDRY-Uni Soviet dengan modal awal sebesar \$17 juta.⁷³

Dalam bidang sumber daya mineral, Uni Soviet, Jerman Timur, dan Czechoslovakia ikut membantu dalam pencarian simpanan mineral tahun 1989. Hal ini termasuk melatih sumber daya manusia untuk mengevaluasi kepekatan simpanan batu kapur di daerah yang disinyalir terkandung batu kapur.⁷⁴ Keberadaan sumber daya mineral di PDRY ini memang masih belum sepenuhnya dipergunakan. Prospek untuk tembaga dan mineral lainpun baru dimulai pada akhir tahun 1975. Bantuan dari Uni Soviet juga diberikan dalam bidang pembangunan dan perbaikan komunikasi dan infrastruktur udara. Uni Soviet juga membantu dalam pembangunan stasiun radio di Aden.⁷⁵

Data-data di atas menggambarkan bahwa hal-hal yang terjadi dapat mempengaruhi lancarnya proses unifikasi PDRY dan YAR. Apakah itu konflik

⁷¹ Ibid, hal. 964.

⁷² REF Year Book Mid., 1991, op. Cit., hal. 965.

⁷³ REF Year Book Mid., 1990, op. Cit., hal. 968.

⁷⁴ REF Year Book Mid., 1991, op. Cit., hal. 966.

⁷⁵ Ibid, hal. 1008.

antardua negara yang terjadi, atau konflik dalam negeri masing-masing, ataupun juga hubungan masing-masing negara dengan negara asing lain, misalnya Uni Soviet dengan negara Blok Timurnya, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dll.

Saudi Arabia dan Uni Soviet secara umum menyambut proses unifikasi ini, tetapi ke-2 negara ini khawatir bahwa masing-masing negara yang mereka "lindungi" ini akan menjadi partner yang lemah dan menjadi di bawah dominasi pihak lawannya. Sehingga mereka pun berusaha melakukan cara-cara agar unifikasi dapat terhambat, atau apabila mungkin tidak dapat terlaksana.

BAH V

KESIMPULAN



Perselisihan militer yang terjadi berulang-ulang antara tahun 1970-1980an dan selalu diakhiri dengan “ikut sertanya” Liga Arab sebagai penengah untuk mengusahakan suatu perdamaian akhirnya mencetuskan suatu ide untuk mengadakan unifikasi dua negara yang sedang mengalami konflik berkepanjangan, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara.

Meskipun pada dasarnya ide unifikasi ini disetujui oleh kedua belah pihak, tetapi masih banyak hal yang mempengaruhi lambatnya pencapaian unifikasi ini, antara lain adanya konflik di masing-masing negara Yaman Utara dan Yaman Selatan karena sering bergantinya kepemimpinan dan sistem pemerintahan negara. Hal ini mengakibatkan tidak terfokusnya pemikiran masing-masing pemimpin negara untuk segera mewujudkan unifikasi.

Faktor penghambat yang lain, adalah adanya konflik antardua negara Yaman Utara dan Yaman Selatan karena perbedaan ideologi disertai pengaruh dari luar antara lain kedekatan pihak Yaman Utara dengan Saudi Arabia dan negara Blok Barat dan kedekatan pihak Yaman Selatan dengan USSR dan sekutunya yaitu negara-negara dari Blok Timur lewat bantuan-bantuan yang diberikan. Padahal, sudah menjadi suatu kejelasan bahwa negara-negara Blok Barat dan Blok Timur saat itu sedang gencar-gencarnya melakukan perang dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan menyebarkan pengaruh di negara-negara seluruh dunia untuk mendapatkan sekutu untuk kepentingan blok masing-masing sebanyak mungkin.

Adanya suatu keinginan bersama dari kedua belah pihak, buruknya kondisi ekonomi di kedua negara, penemuan minyak di daerah perbatasan dua negara, dan runtuhnya negara komunis terbesar di dunia yaitu Uni Soviet sebagai sekutu utama Yaman Selatan merupakan faktor utama yang sangat mendukung bagi terlaksananya proses unifikasi dua negara Yaman ini.

Tanda-tanda unifikasi dimulai pada saat persetujuan untuk berunifikasi yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 1972 di Kairo dan pada tanggal 28

Februari 1973 saat dua kepala negara mengadakan pertemuan lanjutan untuk menandatangani deklarasi Tripoli. Inti dari deklarasi itu adalah pembentukan sebuah negara tunggal gabungan YAR dan PDRY yang akan mempunyai satu bendera, lambang, lagu kebangsaan, Ibukota, presiden, lembaga legislatif dan eksekutif tingkat tinggi, dan kekuasaan dalam bidang hukum.

Masa depan unifikasi semakin jelas pada akhir 1981 ketika sebuah komite konstitusional berhasil mempresentasikan model/draf pendirian sebuah parlemen yang demokratis untuk negara Yaman yang baru. Dan pada tanggal 22 Mei 1990, terwujudlah sebuah impian seluruh masyarakat Yaman untuk berunifikasi, pada saat dideklarasikannya sebuah negara Yaman yang baru dan merdeka untuk mencapai sebuah harapan masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dougherty, James.E & Robert Pfaltzgraf jr. (1977). *Contending Theories of International Relation : A Comprehensive Survey*, Longman, New York.
- _____ (1978). *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, Terjemahan 11, Amien Rais, UGM, Yogyakarta.
- F. Iswara., (1976). *Pengetahuan Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung.
- Mohtar Mas' oed, (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis daerah Teorisasi*, UGM, Studi Sosial, Yogyakarta.
- _____ (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta.
- Noneman, Gerd (1994). *Colliers Encyclopedia Vol. XXIII*, , P.F. Collier, L.P, New York.
- _____ *REF Year Book Mid. The Middle East and North Africa 1992*, 37th ed (1990), Europe Publication, England.
- _____ *REF Year Book Mid. The Middle East and North Africa 1992*, 38th ed (1991), Europe Publication, England.
- _____ *Republic of Yemen*, (2000). *Republic of Yemen; 10 Years of Achievements 1990-2000*, Ministry of Planning and Development, Arab Paper Converting and Trading Co. LTD., Sana`a.
- Sutrisno Hadi, (1986). *Metode Research*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- The Liang Gie (1978). *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winardi Surahmat, (1970). *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung.

JURNAL DAN BULETIN:

Roberts, John, (1994). *Civil War in Yemen*, IBRU: Boundary and Security/ Bulletin, volume II, no. 2. Juli.

Shmitz, Chuck (1995). *Civil War in Yemen: Price of Unity?*, Current History, vol. 94, no. 588, Januari.

Ursula, Braun (1992). *Yemen: Another Case of Unification*, Aussen Politic, vol. 43, no. 2..

_____ (1991). *Encyclopedia of Knowledge*, Grolier Inc., Danbury, Connecticut.

WEBSITE INTERNET (diakses pada tanggal 6 Agustus 2002):

<http://www.al-bab.com/yemen/unity/unif.htm>

<http://www.gpc.org.ye/const.htm>

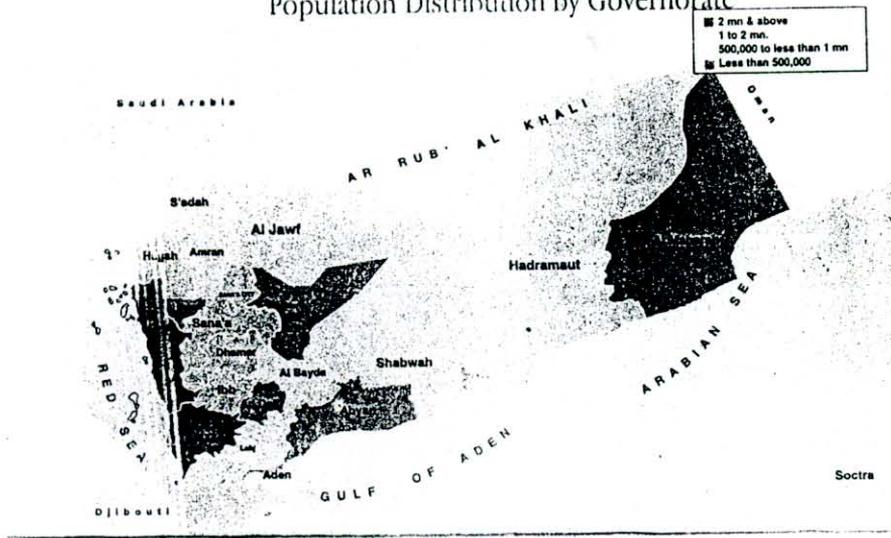
http://www.arab.net/yemen/history/yn_unification.html

<http://www.arab.net/yemen.html>



Illustrated Atlas of the world, 1989, Rand Mc Nally & co., USA, page 150.

Population Distribution by Governorate



Republik of Yemen, (2000), 10 Years of Achievements 1990-2000, Ministry of Planning and Development, page 30.

